



UIN IMAM BONJOL
PADANG

Latar Belakang

Gambaran Umum Organisasi

Sumber Daya Manusia

Realisasi Anggaran

Dasar Hukum

Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

Sistematika Pelaporan

Capaian Kinerja Organisasi

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud komitmen UIN Imam Bonjol Padang dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kinerja institusi secara berkelanjutan.

LKjIP UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2025 disusun sebagai bentuk implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat kelembagaan yang meliputi visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis UIN Imam Bonjol Padang sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

Dokumen LKjIP ini memiliki peran strategis sebagai instrumen evaluasi kinerja, karena memuat keterpaduan antara capaian kinerja program dan kegiatan dengan dukungan anggaran yang menyertainya. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat efektivitas, efisiensi, dan produktivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi UIN Imam Bonjol Padang sepanjang Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini dilakukan secara cermat dan sistematis dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang, serta didukung oleh komitmen dan peran aktif unsur pimpinan.

Melalui integrasi antara kinerja kegiatan dan kinerja anggaran, LKjIP Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bersama dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja di masa mendatang. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan strategis, khususnya dalam mendukung pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) UIN Imam Bonjol Padang.



Akhir kata, kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan kinerja institusi di masa yang akan datang. Semoga LKjIP ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam upaya peningkatan tata kelola dan kinerja UIN Imam Bonjol Padang secara berkelanjutan.

Padang, 4 Februari 2026



Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd
NIP. 197308182005012004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	6
B. Dasar Hukum	7
C. Gambaran Umum Organisasi	8
D. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	10
E. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Unsur/Dewan Pengawas	11
F. Sumber Daya Manusia	14
G. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	14
H. Sistematika Pelaporan	36
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029	38
B. Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	44
B. Realisasi Anggaran	68
C. Nilai Kinerja Anggaran (Nilai SMART dan Nilai IKPA)	86
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
C. Penutup	95

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang merupakan bentuk dari tanggung jawab dan pencapaian kinerja dari hasil pelaksanaan rencana strategis (RENSTRA) UIN Imam Bonjol Padang. Penyusunan Laporan Kinerja ini pada merupakan bentuk kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025.

Penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2025, Rektor UIN Imam Bonjol Padang memiliki Indikator Kinerja Utama yang berisikan 7 (tujuh) Sasaran Strategis yang diturunkan menjadi 22 (dua puluh dua Indikator Kinerja Utama dari Perjanjian Kinerja Pendis, Kontrak Kinerja BLU dan Program Prioritas Rektor).

Khusus dengan pengelolaan anggaran, dari total anggaran UIN Imam Bonjol Padang tahun anggaran 2025 sebesar Rp 265.720.093.000,00 (dua ratus enam puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh juta tiga sembilan puluh tiga ribu rupiah) sampai dengan akhir Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp 202.652.418.348,00 (dua ratus dua milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) atau sebesar 76,27%. Terjadi penurunan pada serapan anggaran UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2025 sebesar 19,05% dari tahun 2024 (sebesar 95,32%) karena adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SE. 12 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran Kementerian Agama Tahun 2025 dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Agama tanggal 7 Maret 2025.

Melalui Laporan Kinerja (LKj) 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja merupakan faktor kunci yang harus disampaikan, sehingga amanah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bersih, efisien dan efektif dapat terwujud.

Pelaporan kinerja merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja instansi pemerintah merupakan media untuk mempertanggungjawabkan kinerja instansi yang memuat informasi kinerja terkait pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja, analisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja serta analisis capaian kinerja tahun yang bersangkutan dengan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Seiring dengan meningkatnya wawasan dan kesadaran politik masyarakat bersamaan dengan proses globalisasi dan demokratisasi, maka tuntutan akan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) semakin mengemuka.

Untuk dapat menyesuaikan dengan berbagai perubahan dalam masyarakat dan lingkungan nasional maupun internasional yang begitu cepat, maka menjadi keharusan bagi daerah untuk semakin meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan agar dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan public serta tuntutan perubahan dalam masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan

perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar Pemerintah senantiasa dapat mengakomodasi kebutuhan perubahan dengan mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*.

Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik dan semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif dari seluruh lembaga pemerintahan pada tingkat daerah serta partisipasi aktif dari masyarakat langsung. LKjIP UIN Imam Bonjol Padang ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut.

LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Tujuan penyusunan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan acuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) RI, Renstra Kementerian Agama RI, Renstra Dirjen Pendidikan Islam, penyusunan LKjIP UIN Imam Bonjol Padang didasarkan pada indikator kinerja yang ada yang ditetapkan lewat tujuan dan sasaran yang direncanakan tersebut.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan LKjIP UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2025 didasarkan pada beberapa landasan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Presiden Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan tiga kali perubahan, PMA Nomor 37 Tahun 2019, PMA 54 Tahun 2022, dan PMA Nomor 9 tahun 2023.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama.

C. Gambaran Umum Organisasi

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang merupakan salah satu Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang ada di Sumatera Barat. Letak kampus UIN Imam Bonjol Padang adalah sangat strategis apabila dibandingkan dengan kampus-kampus Islam negeri yang lain. Sejauh ini, UIN Imam Bonjol Padang memiliki 3 (tiga) kampus yang semuanya terletak di Kota Padang.

UIN Imam Bonjol Padang yang sebelumnya bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) berdiri pada tanggal 21 November 1966 dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 77 Tahun 1966. Setelah berdiri lebih kurang 50 tahun, IAIN Imam Bonjol Padang mendapat amanat dari Kementerian Keuangan sebagai Perguruan Tinggi dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) pada tahun 2015, hal ini dilegalkan dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 386/KMK.05/2015.

Tidak lama setelah menjadi PK-BLU, IAIN Imam Bonjol Padang menjalani transformasi diri dari Institut menjadi Universitas Islam Negeri. Transformasi UIN Imam Bonjol Padang tersebut ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dengan adanya perubahan status tersebut, maka secara otomatis struktur organisasi dan tata kerja UIN Imam Bonjol Padang juga mengalami perubahan. Perubahan struktur organisasi dan tata kerja UIN Imam Bonjol Padang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada tanggal 20 Juli 2017. Selain struktur organisasi dan tata kerja, statuta UIN Imam Bonjol Padang juga mengalami perubahan atau penyesuaian dengan terjadinya transformasi tersebut. Statuta UIN Imam Bonjol Padang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada tanggal 28 September 2017. Seiring transformasi status tersebut, minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di UIN Imam Bonjol Padang juga meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah calon mahasiswa yang mendaftar baik melalui jalur reguler maupun jalur mandiri.

Dengan adanya perubahan regulasi dan meningkatnya minat masyarakat terhadap UIN Imam Bonjol Padang, maka UIN Imam Bonjol Padang perlu menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) secara efektif dan efisien serta tepat sasaran dan waktu. Penyusunan LKj UIN Imam Bonjol Padang Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

Penyusunan LKj UIN Imam Bonjol Padang tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, Visi dan Misi, Tujuan dan

Sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Selain itu, LKj juga sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja UIN Imam Bonjol Padang pada tahun mendatang. Penyusunan LKj juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan Pencapaian Kinerja UIN Imam Bonjol Padang yang dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Pada prinsipnya, substansi penyusunan LKj ini berdasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing fakultas, lembaga, bagian dan unit yang ada di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang.

D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Kedudukan, Tugas dan Fungsi UIN Imam Bonjol Padang disebutkan sebagai berikut:

1. Kedudukan

Universitas secara organisasi berada di lingkungan Kementerian Agama dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama, yang dipimpin oleh seorang Rektor dan dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam secara fungsional.

2. Tugas Pokok

Tugas pokok UIN Imam Bonjol Padang adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam, dan ilmu umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Melakukan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam, dan ilmu umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam, dan ilmu umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Fungsi UIN Imam Bonjol Padang sebagaimana disebutkan dalam ortaker adalah sebagai berikut:

- 1) Perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
- 2) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan Islam, dan ilmu umum;
- 3) Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika.

E. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Unsur/Dewan Pengawas

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Imam Bonjol Padang organisasi Universitas terdiri atas organ pengelola, organ pertimbangan, dan organ pengawasan.

1. Organ Pengelola

a. Rektor dan Wakil Rektor

Jabatan	Nama Pejabat
1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang	Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan	Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D.
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan	Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag.
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama	Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D.

b. Fakultas

Jabatan	Nama Pejabat
1. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Prof. Dr. Yasmadi, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah	Dr. Alfadli, M.Ag.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama	Dr. Sefriyono, S.Ag., M.Pd.
4. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi	Dr. Murisal, S.Ag., M.Pd.

5. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora	Prof. Dr. Taufiqurrahman, M.Ag., M. Hum.
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Prof. Dr. Testru Hendra, M.Ag.
7. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi	Dr. Yulia, M.Pd.

c. Pascasarjana

Jabatan	Nama Pejabat
1. Direktur Pascasarjana	Prof. Ahmad Wira, M.Si., M.Ag., Ph.D.
2. Wakil Direktur Pascasarjana	Prof. Dr. Elfia, M.Ag.

d. Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaia

Jabatan	Nama Pejabat
1. Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	Dr. H. Muhamad Nur, M.A.
2. Kepala Bagian Umum	Neldawati, S.Ag., S.IPI., M.M.
3. Ketua Tim Fungsi Perencanaan dan Keuangan	Aryanaldi, S.E.
4. Ketua Tim Fungsi Organisasi dan Kepegawaian	Alnungki Herlinda, S.H., M.M.

e. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama

Jabatan	Nama Pejabat
1. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama	Dr. H. Masmuni Mahatma, S.Fil.I., M.Ag.
2. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	Arfita Yessie, S.E.
3. Ketua Tim Fungsi Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama	Drs. Mardius M, M.M.

f. Lembaga

Jabatan	Nama Pejabat
1. Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Dr. Hermawati, M.Si.
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Dr. Wakidul Kohar, M.Ag.

g. Unit Pelaksana Teknis

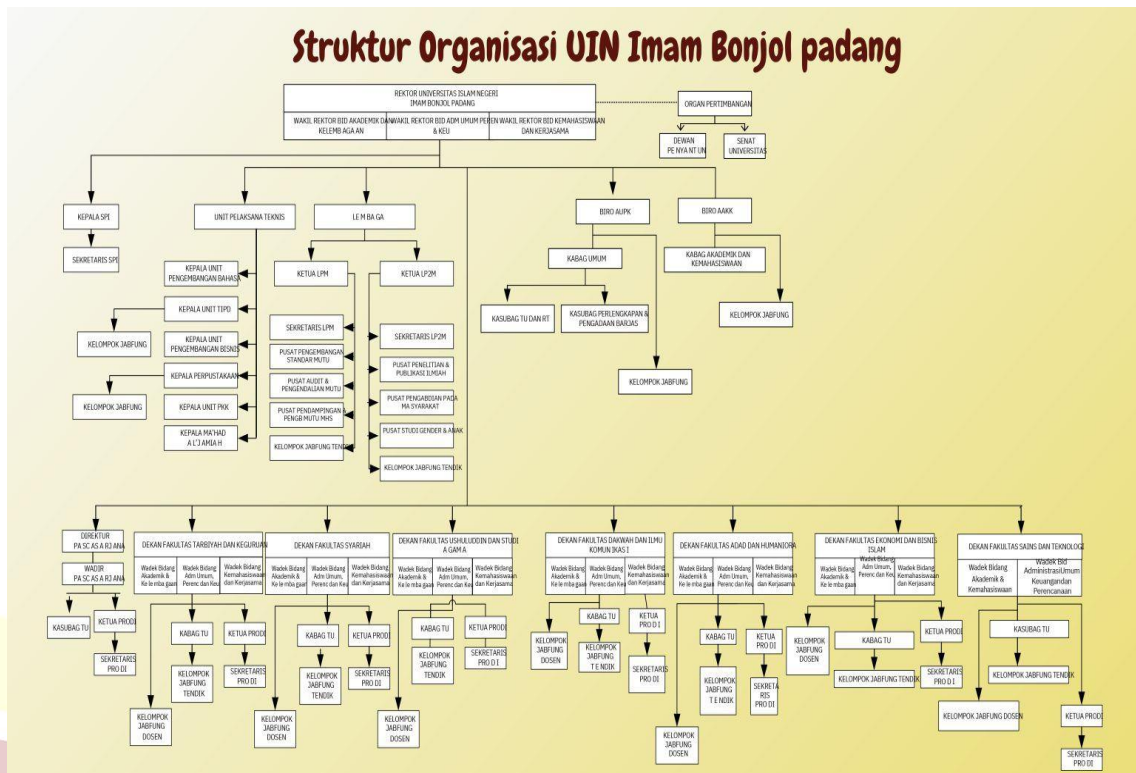
Jabatan	Nama Pejabat
1. Kepala UPT Perpustakaan	Fadhila Nurul Husna Zalmi, M.Hum.
2. Kepala UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	Muhammad Teguh Brillian, M.T.I.
3. Kepala UPT Pengembangan Bahasa	Chanti Diananseri, M.Pd.
4. Kepala UPT Pengembangan Bisnis	Dr. Winbaktianur, M.A.
5. Kepala UPT Pengembangan Kewirausahaan dan Karir.	Dr. Sermal, S.Ag., M.Pd.
6. Kepala UPT Ma'had Al Jami'ah Tuanku Imam Bonjol	Dr. Zulkifli, S.PD.I., MA.

2. Organ Pertimbangan

Jabatan	Nama Pejabat
1. Ketua Senat Universitas	Prof. Dr. Awis Karni, M.Ag.
2. Sekretaris Senat	Prof. Dr. Ikhwan, SH, M.Ag.

3. Organ Pengawas

Jabatan	Nama Pejabat
1. Kepala Satuan Pengawasan Internal	Wahyu Ramadani, S.Pd.
2. Sekretaris Satuan Pengawasan Internal	Andre Wiratha, M.M.



F. Sumber Daya Manusia

UIN Imam Bonjol Padang memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Hingga Tahun 2025, jumlah mahasiswa tercatat sebanyak 15.618 orang, yang didukung oleh 418 tenaga pengajar dan 215 tenaga kependidikan.

Dari sisi kualifikasi pendidikan, tenaga pengajar UIN Imam Bonjol Padang didominasi oleh dosen dengan jenjang pendidikan tinggi. Sebanyak 193 orang atau 46,17% berpendidikan doktor (S3), sedangkan 225 orang atau 53,83% berpendidikan magister (S2). Komposisi ini mencerminkan komitmen institusi dalam meningkatkan mutu akademik dan profesionalisme dosen.

Berdasarkan jabatan fungsional, tenaga pengajar UIN Imam Bonjol Padang terdiri atas 36 guru besar (8,61%), 112 lektor kepala (26,79%), 207 lektor (49,52%), dan 65 asisten ahli (15,55%). Struktur jabatan tersebut menunjukkan dominasi dosen pada jenjang lektor sebagai penggerak utama kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

G. Aspek Strategis Dan Permasalahan Utama

UIN Imam Bonjol Padang dalam mempercepat kinerja dan meningkatkan efektivitas serta mendukung visi dan misi, memiliki sasaran strategis yang dijelaskan melalui Sasaran Program dan Indikator Kinerja Tahun 2025, sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada Pendidikan Tinggi	Persentase peningkatan mahasiswa pada PTK
		Persentase peningkatan mahasiswa berkebutuhan khusus pada PTK
2	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu	Persentase Prodi yang mendapatkan akreditasi A/unggul

		Persentase lulusan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi
		Persentase PTK yang melaksanakan sistem penjaminan mutu
		Persentase PTK yang melaksanakan standar manajemen kelembagaan
		persentase mahasiswa PTK yang memiliki tingkat kemampuan literasi keagamaan minimal baik
3	Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas	Persentase dosen PTK yang memperoleh sertifikasi pendidik
4	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja	Persentase lulusan PTK yang berhasil memiliki pekerjaan atau berwiraswasta
5	Meningkatnya Kerjasama PTK	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dalam tri dharma
6	Meningkatnya produktivitas dan daya saing Pendidikan Tinggi	Persentase artikel jurnal bereputasi nasional yang disitasi
		Persentase PTK yang berkontribusi pada pencapaian SDGs
7	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	Predikat Opini Laporan Keuangan
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian

		Intern Pemerintah (SPIP)
		Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		Indeks Pelayanan Publik
		Indeks BerAkhlak
		Tingkat Maturitas Statistik Sektoral
		Tingkat implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI)
		Nilai Kinerja Anggaran

Untuk melihat potensi dan permasalahan UIN Imam Bonjol Padang, dilakukan survey terhadap civitas akademika UIN Imam Bonjol Padang. Berdasarkan hasil survey tersebut dapat dipetakan kondisi objektif UIN Imam Bonjol Padang yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Aspek	Narasi
A	Peluang	
1.	Jaringan kerjasama dengan lembaga pendidikan islam lain di dalam dan luar negeri	Saat ini, tuntutan berkolaborasi semakin meningkat untuk menghadapi tingginya kompleksitas dan ragam permasalahan yang ada. UIN Imam Bonjol Padang memandang kondisi ini sebagai suatu peluang untuk berkontribusi nyata sekaligus membangun citra yang baik di masyarakat. UIN Imam Bonjol Padang akan membangun jaringan kerja sama dengan lembaga pendidikan Islam dalam lingkup regional dalam rangka berkontribusi menyelesaikan isu masyarakat di Sumatera Barat yang pada hakikatnya adalah

		<p>masyarakat muslim. UIN Imam Bonjol Padang juga akan membangun jaringan dengan lembaga pendidikan Islam lainnya di Indonesia dan di lingkup internasional untuk memperkuat keilmuan serta mendukung perkembangan wisata halal dan industri halal yang pada akhirnya mendorong kemajuan Islam di dunia</p>
2.	<p>Peluang kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta di wilayah sekitar SUMBAR</p>	<p>Beririsan dengan icon yang dimiliki oleh UIN Imam Bonjol Padang tidak tertutup kemungkinan dapat membangun arah baru dalam bentuk kerja sama dengan pemerintah yang ada di Sumatera Barat. Hal ini mengingat bahwa dengan fenomena yang berkembang pada level birokrasi, pengelolaan tatanan pemerintah akan membuka cakrawala baru yang saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. Persoalan ini tentu saja akan melahirkan kekuatan-kekuatan yang berbasis akademik pada pemerintah Sumbar. Setidaknya ada beberapa elemen yang dapat diperkuat oleh UIN Imam Bonjol terhadap pemerintah sumbar, a) pada aspek keagamaan yang dimiliki oleh UIN Imam Bonjol Padang, hal yang dapat ditawarkan terhadap pemerintah nagari adalah dengan bentuk pengelolaan wisata dengan semangat religiusitas. Sehingga, yang dapat dibangun adalah nilai-nilai keadaban terhadap wisatawan sebagai arah kebijakan pemerintah sumbar akhir-akhir ini. b) pada aspek keilmuan; dengan minimnya kemampuan managerial digitallisasi pada level pemerintahan nagari, UIN Imam Bonjol Padang dengan adanya Fakultas Sains dan Teknologi memungkinkan</p>

		<p>memiliki penawaran baru dengan membangun kerjasama dengan pemerintah sumbar yang memiliki nagari 802 nagari yang dinaungi. Hal yang dapat ditawarkan adalah pengelolaan nagari berbasis digital oleh pemerintah nagari. Dengan fenomena yang berkembang bahwa nagari adalah basis kultur bagi orang Minangkabau, dan ke Minangkabauan adalah spiritualitas bagi pemerintah Sumbar dalam menentukan arah kebijakan, agaknya, hal semacam ini menjadi nilai tawar yang dapat dilakukan antara UIN Imam Bonjol Padang dengan pemerintah Sumbar</p>
3.	Hubungan kampus dengan Alumni	<p>UIN Imam Bonjol Padang memiliki hubungan yang baik dengan alumni melalui ikatan alumni UIN Imam Bonjol Padang. Ikatan alumni UIN Imam Bonjol Padang memiliki berbagai program yang mendukung pengembangan UIN Imam Bonjol Padang, seperti pemberian beasiswa, pembinaan akademik dan pemberian bantuan informasi lapangan kerja, memberikan masukan kurikulum dan peningkatan mutu UIN Imam Bonjol Padang.</p>
4.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan ekonomi, layanan keuangan/ perbankan berbasis syariah	<p>Potensi keuangan Syariah di Indonesia sangat besar. Hal ini terlihat dari Indonesia sebagai peringkat 4 Dunia dalam pengembangan keuangan Syariah. Sumatera Barat menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi syariah dan pengembangan Industri halal. Ini akan menjadi peluang bagi UIN Imam Bonjol Padang. Dengan adanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Lembaga Pemeriksa Halal di UIN Imam Bonjol Padang, peran serta UIN Imam Bonjol Padang</p>

		akan semakin besar untuk pengembangan ekonomi syariah dan industri halal. UIN Imam Bonjol Padang dapat menjadi mitra lembaga keuangan, perbankan dan pemerintah dalam pengembangan perbankan syariah dan industri halal
5.	Adanya social capital Minangkabau dengan salah satu norma dalam kehidupan masyarakat	Menguatnya nilai-nilai agama dalam masyarakat Minangkabau dan dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengandalkan penguatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai dasar tata kelola kehidupan masyarakat, maka di Minangkabau nagari sebagai institusi pemerintahan lokal dengan arah pengembangan dan kebijakan pembangunan di Sumatera Barat diorientasikan pada pengembangan nilai-nilai religius dan penguatan tata kelola yang berlandaskan Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah. Dalam konteks ini maka UIN Imam Bonjol Padang menempati posisi penting sebagai centre of knowledge, pusat pengembangan keilmuan dalam membentuk karakter dalam memproduksi pengetahuan sesuai dengan arah pembangunan di Sumatera Barat.

6.	Berkembangnya industri kreatif dan pariwisata halal di tengah masyarakat	Trend Halal Tourism ini seharusnya merupakan nafas baru bagi pariwisata Minangkabau. Ini merupakan peluang yang sangat bagus dan seirama dengan langgam pengembangan pariwisata yang dikehendaki oleh tatanan nilai & kultur Minangkabau, yang ditunggu- tunggu oleh masyarakat. Kekhawatiran akan social impact pariwisata perlahan-lahan akan mulai pergi, berganti dengan optimisme dan totalitas untuk mengembangkan dunia pariwisata seiring dengan munculnya pasar “muslim travelers”. Ditambah lagi Sumatera Barat memiliki keindahan alam yang sangat indah, budaya yang sangat unik, khazanah kuliner yang sangat nikmat, khazanah wisata sejarah dan ziarah Islam yang sangat menarik dengan banyak kisah para ulamanya, dan banyak lagi keunggulan lainnya. Perkembangan pariwisata halal ini juga akan memberi impact pada sektor lain termasuk industri kreatif. Setiap daerah di Sumatera Barat memiliki potensi industri kreatif dari makanan, kerajinan, seni dan pakaian. UIN Imam Bonjol Padang juga berpeluang dalam mengembangkan industri kreatif dan pariwisata halal ini melalui kerjasama dengan pemerintah sumatera barat, kota dan kabupaten
7.	Keterbatasan anggaran pemerintah dalam mendukung pengembangan PT	keterbatasan anggaran pemerintah dalam mendukung pengembangan PT dan keluarnya kebijakan otonomi pendidikan, memberi dampak positif bagi perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki otonomi dalam pengembangan institusi baik akademik dan non akademik. Untuk anggaran, perguruan tinggi juga memiliki otonom dalam pengelolaan anggaran dan asetnya. UIN Imam Bonjol Padang memiliki peluang

		dalam pengelolaan keuangan dan aset yang dimiliki dalam pengembangan akademik dan non akademik.
B	Ancaman	
1.	Meningkatnya tuntutan dunia kerja atas kemampuan softskills lulusan	UIN Imam Bonjol Padang menghadapi ancaman serius dalam mengatasi tuntutan dunia kerja terhadap kemampuan soft skills lulusan. Kurangnya pengembangan keterampilan interpersonal, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah dapat mengancam reputasi perguruan tinggi, kesuksesan alumni, daya tarik institusi, dan keseimbangan keuangan. Ancaman ini dapat mengakibatkan penurunan minat calon mahasiswa, kehilangan dukungan finansial dari alumni, serta potensi penurunan status akreditasi. Oleh karena itu, UIN Imam Bonjol Padang sebagai perguruan tinggi harus mengambil tindakan yang cepat dan proaktif untuk mengintegrasikan pengembangan soft skills ke dalam kurikulum, memberikan pelatihan dan pendampingan khusus, serta menjalin kemitraan erat dengan industri untuk memastikan lulusan siap menghadapi kompleksitas dunia kerja yang terus berubah
2.	Meningkatnya tuntutan pada kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan tinggi, meliputi kecepatan, kelengkapan sarana dan aplikasi TIK	Sejumlah ancaman yang dihadapi meliputi, kurangnya infrastruktur TIK yang memadai, risiko keamanan siber, biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi yang tinggi, kesulitan mengikuti perkembangan teknologi, ketergantungan pada platform tertentu, dan potensi stres akibat ketergantungan pada teknologi. UIN Imam Bonjol Padang sebagai perguruan tinggi perlu mengambil langkah-langkah proaktif seperti investasi dalam

		infrastruktur dan keamanan TIK, pelatihan untuk mahasiswa dan dosen, serta fleksibilitas dalam mengatasi perubahan teknologi. Upaya ini diperlukan untuk memastikan pengalaman pembelajaran yang berkualitas dan memenuhi tuntutan dunia pendidikan yang semakin terhubung secara digital.
3.	Peningkatan tuntutan kebutuhan pengguna atas kompetensi lulusan perguruan tinggi	Peningkatan tuntutan kebutuhan pengguna terhadap kompetensi lulusan perguruan tinggi membawa sejumlah ancaman yang perlu diatasi. UIN Imam Bonjol Padang menghadapi risiko kesenjangan keterampilan, ketidaksesuaian kurikulum, kurangnya kolaborasi dengan industri, keterbatasan sumber daya, perubahan dinamika pekerjaan, ketidaksesuaian soft skills, dan persaingan dari pendidikan online dan alternatif. Untuk mengatasi ancaman ini, UIN Imam Bonjol Padang perlu memfokuskan pada pembaruan kurikulum, pengembangan kemitraan industri, pemanfaatan teknologi pendidikan, pelatihan dosen, dan pengembangan keterampilan soft skills pada lulusan. Respons yang cepat terhadap perubahan dalam tuntutan kebutuhan pengguna dan pasar kerja juga menjadi faktor penting dalam menjaga relevansi dan daya saing institusi pendidikan tinggi.
4.	Meningkatnya persaingan dengan lembaga pendidikan tinggi dalam menawarkan pendidikan berkualitas	Meningkatnya persaingan dengan lembaga pendidikan tinggi dalam menawarkan pendidikan berkualitas merupakan ancaman serius bagi UIN Imam Bonjol Padang. Beberapa risiko yang dihadapi seperti penurunan jumlah pendaftar, pemisahan perhatian calon mahasiswa, dan penurunan reputasi jika tidak dapat bersaing secara efektif. Persaingan ini juga dipengaruhi oleh globalisasi pendidikan, inovasi

		<p>teknologi, reputasi institusi, dan biaya pendidikan. UIN Imam Bonjol Padang perlu meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan program-program inovatif, memfokuskan pada bidang spesialisasi, mengadopsi teknologi pendidikan, dan menyusun strategi pemasaran yang kuat untuk menarik calon mahasiswa. Upaya ini akan membantu menjaga daya tarik dan relevansi institusi dalam kompetisi yang semakin ketat di dunia pendidikan.</p>
5.	<p>Kebutuhan masyarakat atas luaran Perguruan tinggi berupa penelitian dan pengabdian masyarakat</p>	<p>Ancaman bagi UIN Imam Bonjol Padang terhadap kebutuhan masyarakat atas luaran berupa penelitian dan pengabdian masyarakat ini meliputi fokus pada kuantitas daripada kualitas, keterbatasan sumber daya, tuntutan kurikulum dan pengajaran, keterbatasan keterlibatan industri, ketidakcocokan prioritas, pengakuan dan insentif yang tidak sesuai, serta kurangnya dampak nyata dari kegiatan tersebut. Kolaborasi dengan industri, pengelolaan sumber daya dengan bijaksana, dan fokus pada kualitas luaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki dampak nyata, menjadi kunci dalam memenuhi tuntutan masyarakat atas penelitian dan pengabdian yang relevan dan berdampak sebagai cara bagi UIN Imam Bonjol Padang dalam mengatasi ancaman ini.</p>
6.	<p>Peluang Kerjasama KSO</p>	<p>Peluang kerjasama Kemitraan Strategis Operasional (KSO) juga menjadi ancaman bagi UIN Imam Bonjol Padang. Ancaman ini meliputi kurangnya dukungan dari pihak industri atau lembaga mitra, persaingan dengan institusi lain dalam menarik kerjasama, perbedaan tujuan dan prioritas, serta kesulitan dalam menjaga keseimbangan keuntungan antara pihak yang</p>

		terlibat. UIN Imam Bonjol Padang perlu membangun hubungan saling menguntungkan dan kesesuaian visi serta tujuan.
7.	Pemahaman Masyarakat atas profil, kompetensi dan kapabilitas lulusan UIN	<p>Beberapa ancaman yang dihadapi terkait pemahaman masyarakat tentang profil, kompetensi, dan kapabilitas lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) seperti, persepsi yang kurang akurat tentang kualitas lulusan, miskonsepsi terkait kurikulum dan tujuan pendidikan</p> <p>Islam, serta ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dan lulusan yang dihasilkan. UIN Imam Bonjol Padang perlu melakukan komunikasi yang efektif, transparansi dalam informasi tentang program dan prestasi, serta peningkatan kesadaran tentang kontribusi lulusan UIN dalam masyarakat.</p>
8.	Tantangan Integrasi Keilmuan	<p>Integrasi keilmuan antara ilmu keislaman, sains dan teknologi, serta ilmu sosial-humaniora masih menjadi tantangan bagi UIN Imam Bonjol Padang dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, karena belum sepenuhnya terimplementasi secara sistematis dalam kurikulum, roadmap penelitian, maupun model pengabdian. Tantangan ini mengemuka seiring meningkatnya tuntutan pengguna lulusan dan masyarakat terhadap kompetensi multidisipliner yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan antara profil lulusan yang diharapkan dan kompetensi aktual yang dihasilkan, serta mempengaruhi relevansi</p> <p>tridharma perguruan tinggi dalam menjawab kebutuhan pembangunan daerah dan nasional.</p>

9.	Kebijakan moratorium pembukaan prodi baru	UIN Imam Bonjol Padang menghadapi ancaman akibat kebijakan moratorium pembukaan program studi baru. Ancaman ini meliputi penurunan pendapatan institusi akibat kurangnya diversifikasi program, kesulitan dalam menanggapi perkembangan industri dan kebutuhan masyarakat, serta dampak pada reputasi dan daya tarik bagi calon mahasiswa. Mengidentifikasi program yang tetap relevan, meningkatkan kualitas program yang ada, serta berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk tetap bersaing di pasar pendidikan merupakan beberapa solusi bagi UIN Imam Bonjol Padang.
10.	Melambatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat	Ancaman terhadap UIN Imam Bonjol Padang akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi meliputi, dukungan finansial terbatas, persaingan yang lebih ketat, penurunan investasi dalam pendidikan, dan kesulitan pengembangan program. Langkah-langkah yang harus dilaksanakan seperti program beasiswa, fleksibilitas biaya, pengembangan kemitraan, peningkatan pemasaran, dan program pengembangan keterampilan merupakan upaya untuk membantu UIN Imam Bonjol Padang tetap relevan dan berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia berkualitas.
C.	Kekuatan	
1.	Kualifikasi dosen dalam menjalankan pembelajaran dan penelitian	UIN Imam Bonjol memiliki dosen tetap sebanyak 380. Dengan kualifikasi pendidikan S3 sebanyak 157, S2 sebanyak 223, dan terdaftar aktif sebagai peneliti pada sistem Litapdimas Kementerian Agama RI. Dengan potensi sumberdaya dosen yang dimiliki UIN Imam Bonjol, maka sumberdaya tenaga pendidik di UIN Imam Bonjol Padang dipandang baik dan

		berpotensi untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, demi kemajuan bangsa dan pembangunan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia
2.	Tata Kelola keuangan dalam mendukung penyelenggaraan program dan operasional UIN	UIN Imam Bonjol Padang sebagai sebuah perguruan tinggi Islam yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terus berupaya untuk mewujudkan institusi yang sehat dan mampu berkontribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa. Oleh karenanya perlu dikembangkan tata kelola sesuai prinsip good governance university, yaitu fairness, tranparancy, accountability dan responsibility. Sistem tata kelola organisasi ini dikembangkan untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan berkinerja tinggi. Kinerja semua unit dalam organisasi akan diupayakan dapat diakses oleh publik, yang tidak semata-mata untuk pengambilan keputusan secara cepat tetapi juga mampu membangun rasa tanggung jawab dan keadilan. Dengan demikian tata kelola yang ingin ditetapkan oleh UIN, mampu mendukung penyelenggaraan program dan operasional UIN secara berkelanjutan. Diantaranya tata kelola bidang keuangan yang sudah dilakukan adalah: 1) Revisi SOP yang ada, dan penyesuaian dengan perkembangan ortaker yang baru. 2) Membakukan pedoman dan standar layanan minimum 5 tahun ke depan, 3) Memberikan peran yang lebih kepada SPI dalam melakukan Audit/pendampingan dalam hal tata kelola keuangan, 4) menerapkan konsep BLU remunerasi dalam memberikan pelayanan dan memberikan balas jasa yang lebih berkeadilan kepada

		<p>segenap stakeholder, 5) Penerapan IT, dalam mengelola keuangan dengan hadirnya aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran, hal ini memungkinkan dalam penyusunan penganggaran dapat dideteksi kegiatan yang diusulkan dapat menunjang ketercapaian IKU Rektor sekaligus berapa total anggaran yang diperlukan selama setahun, SP2D, dengan aplikasi ini memungkinkan mendeteksi serapan anggaran dari unit terkait dan dengan cepat dapat digunakan dalam membuat laporan secara cepat dan tepat.</p>
3.	<p>Ketersediaan dana untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat</p>	<p>Ketersediaan dana untuk pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat cukup memadai bila dibandingkan dengan dengan jumlah dosen UIN Imam Bonjol. Pada tahun 2019 LP2M mengalokasikan anggaran penelitian sebesar Rp. 1.853.000.000 miliar, dan terserap sebesar Rp. 1.853.000.000 miliar. Untuk pengabdian kepada masyarakat dialokasikan anggaran sebesar Rp. 165.000.000 juta, dan serapannya sebesar Rp. 165.000.000 juta. Pada tahun 2021 LP2M mengalokasikan anggaran penelitian sebesar Rp. 2.408.000.000 miliar, dan keterserapannya sebesar Rp. 1.487.700.000 miliar. Alokasi anggaran pengabdian kepada masyarakat tahun 2019 sebesar Rp. 200.000.000 juta, dan keterserapannya sebesar Rp. 200.000.000 juta. Sedangkan pada tahun 2022 anggaran penelitian dialokasikan sebesar Rp. 4.535.000.000 miliar, dan keterserapannya sebesar Rp. 2.759.000.000 miliar. Untuk pengabdian kepada masyarakat dianggarkan sebanyak 551.000.000 juta dengan serapan sebesar Rp.466.000.000 juta.</p>

4.	Kemampuan dosen dalam melakukan penelitian dan publikasi	Terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun jumlah penelitian dan publikasi dosen UIN Imam Bonjol. Tercatat dalam dokumen Sinta sebanyak 367 autor/penulis UIN Imam Bonjol, dengan 137 dokumen artikel bereputasi [scopus] dengan jumlah sitasi 479 di scopus. Penelitian tahun 2020 sebanyak 97, tahun 2021 sebanyak 98, tahun 2022 sebanyak 104 orang dosen yang terlibat dalam penelitian yang berjumlah sebanyak 162 penelitian selama tiga tahun terakhir, yang berorientasi pada outcome publikasi. Data-data tersebut menunjukkan bahwa dosen memiliki kemampuan yang memadai dalam meneliti dan publikasi sangat. Langkah-langkah yang diambil dalam meningkatkan kemampuan dosen dalam meneliti dan mempublikasi hasil penelitian diantaranya; melakukan [1] short course/workshop metode penelitian; metode riset konvensional [kualitatif dan kuantitatif], metode penelitian pengembangan [research and development], metode penelitian partisipatoris/pendampingan [PAR, CBR, ABCD, SL], metode penelitian berbasis gender, [2] workshop penulisan karya ilmiah, [3] insentif/reward terhadap setiap artikel yang dipublikasi.
5.	Sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi	Ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi sangat cukup memadai dalam melayani kebutuhan setiap kegiatan akademik dimana seluruh gedung pada Kampus 1, 2 dan 3 sudah dihubungkan dengan jaringan fiber optic yang ditunjang dengan kapasitas Bandwidth di lingkungan kampus tahun 2021 sebesar 700 Mbps, tahun 2022 sebesar 1,0 Gbps dan ditingkatkan pada tahun 2023 ini mencapai 1,5 Gbps. Selain memiliki website di tingkat universitas, dan fakultas, masing-

		masing prodi memiliki website sebagai media informasi.
6.	Program pembinaan dan kreatifitas mahasiswa	Ketersediaan rangkaian program untuk pembinaan mahasiswa yang ditampung dalam dalam berbagai kegiatan inovasi kemahasiswaan, menjadi salah satu modal utama bagi UIN Imam Bonjol Padang. Besarnya anggaran pembinaan mahasiswa yang dikucurkan setiap tahunnya menjadi penanda untuk persiapan calon lulusan, misalnya pembinaan persiapan karir, pembinaan soft skill mahasiswa, entrepreneurship, dan pembinaan lainnya guna menghadapi persaingan bebas pasca wisuda. Data dua tahun terakhir menunjukkan bahwa dana lebih kurang satu miliar dialokasikan untuk kebutuhan pembinaan dimaksud.
7.	Keberadaan fasilitas gedung dan kampus baru dalam pelayanan/ penyelenggaraan pendidikan	Keberadaan fasilitas gedung dan kampus baru dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki peran penting. Fasilitas adalah sarana dan prasarana yang harus tersedia untuk melancarkan kegiatan pendidikan di kampus. Sarana adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan untuk proses pendidikan di kampus, meliputi gedung, ruang belajar, media belajar, meja dan kursi. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, meliputi halaman kampus, taman kampus, dan akses jalan menuju kampus. Secara umum, UIN Imam Bonjol Padang dalam pengembangan fasilitas ini, dari tahun ketahun selalu mengalami perkembangan, pada tahun 2023 ini kampus III sebagai icon baru UIN Imam Bonjol

		Padang juga sudah mulai difungsikan. Kampus baru, fasilitas baru, dengan peralatan pendukung yang juga baru dan canggih, akan sangat memadai dalam memenuhi kebutuhan proses pembelajaran dalam peningkatan mutu pendidikan di kampus UIN Imam Bonjol Padang ke depan.
8.	Adanya jurnal untuk publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang bereputasi	UIN Imam Bonjol memiliki rumah jurnal di bawah koordinasi LP2M yang mengelola sebanyak 42 jurnal. Dari 42 jurnal tersebut ada 20 jurnal yang sudah terakreditasi. 1 Jurnal terakreditasi Sinta 2; 4 Jurnal terakreditasi Sinta 3; 4 Jurnal terakreditasi Sinta 4; 11 Jurnal terakreditasi Sinta 5; dan 9 Jurnal sedang dalam proses penilaian akreditasi.
9.	Besaran UKT yang relatif rendah dibanding universitas lain serta ketersediaan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu	UIN Imam Bonjol memiliki UKT yang relatif rendah dibanding Universitas Negeri di Sumatera Barat, baik universitas negeri umum maupun universitas negeri islam. UKT tertinggi UIN Imam Bonjol sebesar di luar PPG adalah Rp. 3.600.000 untuk bidang sains dan teknologi dan Rp. 3.000.000 sampai 3.400.000 juta di luar sains dan teknologi. Ketersediaan beasiswa untuk mahasiswa relatif cukup memadai. UIN Imam Bonjol menyediakan beasiswa [1] KIP [2] Peningkatan Prestasi dan Akademik [3] Prodi Keislaman [4] Tahfidz Quran [5] Kewirausahaan PTKI [6] Bank BNI [7] KJMU [8] Baznas UPZ UIN Imam Bonjol [9] Baznas UPZ Provinsi Sumatera Barat [10] Cendekia Baznas [11] YBM PLN [12] PT Rajawali [13] BSI Scholarship, [14] Bank BSI Zakat, [15] Beasiswa Permata, dan [16] Beasiswa Korpri UIN Imam Bonjol.
D	Kelemahan	

1.	Ketersediaan kurikulum dirancang agar mahasiswa bisa berkembang dan membangun kemandirian sesuai dengan potensinya	Saat ini Kurikulum UIN Imam Bonjol Padang masih memberlakukan KKNI tahun 2017, dan belum melakukan revisi. Untuk dapat merespon dinamika dan perubahan yang cepat, variatif dan disruptif, UIN Imam Bonjol Padang dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran sebagai salah satu dari tridharma perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan pola dan model pembelajaran yang inovatif, kreatif, kolaboratif, dan adaptif sebagai wahana yang dapat mendorong dan membentuk kemampuan mahasiswa terkait dengan kemampuan berpikir, bertindak produktif, dan pengembangan kecerdasan emosional. Oleh karenanya revisi kurikulum menjadi keniscayaan bagi UIN Imam Bonjol Padang untuk merespon hal diatas dalam spirit kurikulum OBE
2.	Tersedianya roadmap penelitian dan pengabdian pada masyarakat	Ketersediaan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UIN Imam Bonjol Padang saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan Perpres No 38 tahun 2018 tentang Rencana Riset Nasional Tahun 2017- 2045, dan PMA No 4 Tahun 2020 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Keagamaan, serta Kep Dirjen Pendis tentang Agenda Riset Nasional. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya SDM pelaksana riset di UIN Imam Bonjol Padang, khususnya dibidang teknologi dan riset terapan
3.	Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dan sistem informasi	Keberadaan fasilitas aplikasi sebagai penunjang pengelolaan UIN Imam Bonjol Padang bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta tata kelola penyelenggaraan

	terintegrasi dalam pengelolaan Universitas	universitas sudah tersedia cukup baik, meskipun bersumber dari berbagai lembaga, baik lembaga di internal maupun eksternal. Pengelolaan informasi berbasis IT yang tidak bersumber dari satu pintu dan terintegrasi dengan sistem yang dikelola oleh pusat, sering menjadi masalah dalam membangun kultur akademik berbasis digital, dan berakibat pada tumpang tindih informasi dan regulasi yang dikelola
4.	Sistem manajemen dan tata kelola Universitas untuk menghasilkan layanan prima	Dalam pelaksanaannya, ketersediaan sistem manajemen dan tata kelola di UIN Imam Bonjol Padang belum berjalan sesuai alurnya. Menumpuknya berbagai pekerjaan pada orang tertentu, dan tidak tersistematisasi dalam IT UIN Imam Bonjol Padang menjadi faktor penghambat memberikan layanan prima kepada masyarakat kampus. Di samping itu, keterbatasan pemahaman pengambil kebijakan juga menyumbang ketimpangan sistem manajemen layanan dalam pengelolaan informasi maupun kebijakan
5.	Kompetensi Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas pelayanan	Ketersedian sumber daya manusia bidang tenaga kependidikan di UIN Imam Bonjol Padang tergolong rendah dalam jumlah kuantitas dan kualitas. Minimnya tenaga Kependidikan yang bersertifikat keahlian menjadi tanda dalam masalah tersebut. Tuntutan dalam memberikan pelayanan berbasis digital serta responsif dengan masalah teknis tidak berbanding lurus dengan jumlah tenaga kependidikan yang dimiliki UIN Imam Bonjol Padang, sehingga berdampak pada output layanan yang tidak maksimal

6.	Sistem monitoring dan evaluasi pembelajaran	Pelaksanaan proses monitoring dan evaluasi belajar yang dijalani mahasiswa di UIN Imam Bonjol Padang masih dilakukan dengan cara manual dan bersifat monoton. Penggunaan teknologi sebagai alat evaluasi maupun monitoring pembelajaran belum dikembangkan dalam bentuk aplikasi yang terintegrasi dengan sistem aplikasi perkuliahan
7.	Ketersediaan dukungan dana bagi peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Banyak usaha yang telah dilakukan UIN Imam Bonjol Padang untuk meningkatkan mutu pendidikan. UIN juga tidak ketinggalan dengan mengadakan kegiatan ilmiah yang dapat mengembangkan potensi pendidik dan kependidikan melalui seminar, pelatihan, workshop dan lainnya secara berkelanjutan. Sehingga SDM menjadi profesional yang mempunyai kemampuan meningkatkan mutu pembelajaran dan layanan, yang pada akhirnya peningkatan mutu pendidikan akan terwujud dan menjadi kenyataan. Namun dalam kenyataannya, dukungan dana ini masih relatif kurang, hal ini terjadi karena yang menjadi prioritas UIN Imam Bonjol Padang, tidak hanya fokus peningkatan SDMsaja, tetapi ada beberapa prioritas lain yang menjadi fokus
8.	Kompetensi Lulusan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa asing (English, Arab)	Kompetensi berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris dan Arab bagi lulusan UIN Imam Bonjol Padang tergolong rendah pada praktek kesehariannya. Salah satu yang melatarbelakangi hal ini adalah penggunaan referensi bahasa asing dalam perkuliahan tidak diwajibkan oleh prodi maupun dosen. Di samping itu, kultur akademik seperti ruang diskusi dalam perkuliahan dan arena publik, dan fasilitas pendukung lainnya tidak didesain untuk

		pengembangan kemampuan berbahasa Inggris dan bahasa Arab mahasiswa, sehingga hal tersebut mempengaruhi kompetensi lulusan berkomunikasi menggunakan bahasa asing
9.	Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dan sistem informasi terintegrasi dalam pengelolaan Universitas	Keberadaan fasilitas aplikasi sebagai penunjang pengelolaan UIN Imam Bonjol Padang bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta tata kelola penyelenggaraan universitas sudah tersedia cukup baik, meskipun bersumber dari berbagai lembaga, baik lembaga di internal maupun eksternal. Pengelolaan informasi berbasis IT yang tidak bersumber dari satu pintu dan terintegrasi dengan sistem yang dikelola oleh pusat, sering menjadi masalah dalam membangun kultur akademik berbasis digital, dan berakibat pada tumpang tindih informasi dan regulasi yang dikelola

Dari pemetaan tersebut dilakukan analisis tentang Kekuatan (*strength*), Kelemahan (*weakness*), Peluang (*opportunity*), dan Ancaman (*threat*) (SWOT). Analisis SWOT tersebut menemukan dasar beberapa aspek penting yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan UIN Imam Bonjol sampai 2029 yang dipaparkan sebagai berikut:

ANALISIS SWOT

✓ STRENGTHS (S)

- Dosen berkualifikasi S2–S3 dan aktif riset
- Tata kelola keuangan BLU berbasis IT
- Dana penelitian dan PkM memadai
- Infrastruktur TIK dan kampus baru
- Jurnal internal terakreditasi
- UKT relatif rendah & banyak beasiswa

△ WEAKNESSES (W)

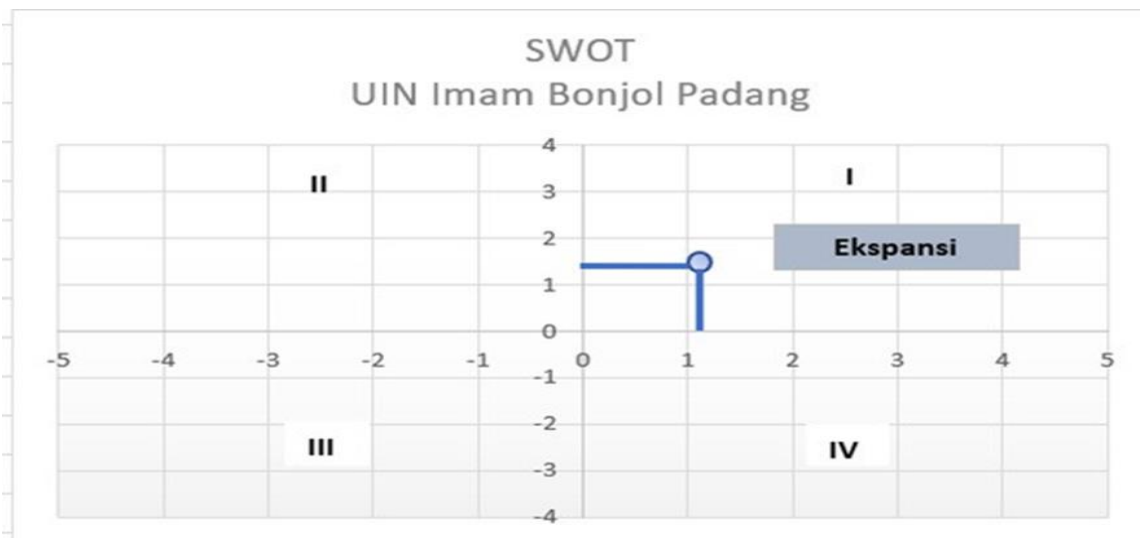
- Kurikulum belum berbasis OBE
- Sistem layanan belum terintegrasi
- Roadmap riset belum selaras nasional
- Kompetensi tendik terbatas
- Kemampuan bahasa asing lulusan rendah

📈 OPPORTUNITIES (O)

- Kerja sama PTKI, pemerintah, swasta
- Pertumbuhan ekonomi syariah
- Industri halal & wisata halal berkembang
- Modal sosial Minangkabau religius
- Otonomi pengelolaan perguruan tinggi

⊖ THREATS (T)

- Tuntutan soft skills lulusan tinggi
- Persaingan antar perguruan tinggi
- Tuntutan layanan pendidikan digital
- Tantangan integrasi keilmuan (keislaman, sains, dan sosial)
- Moratorium pembukaan prodi baru
- Perlambatan ekonomi masyarakat



Berdasarkan komposisi SWOT pada gambar, posisi UIN Imam Bonjol Padang berada pada Kuadran I (SO – Strength–Opportunities). Alasannya bersifat struktural dan strategis:

1. Kekuatan internal relatif dominan

Kualifikasi dosen (S2–S3 dan aktif riset), dukungan pendanaan penelitian dan PKM, sistem keuangan BLU berbasis IT, infrastruktur TIK dan kampus baru, jurnal terakreditasi, serta akses pendidikan yang inklusif (UKT rendah dan beasiswa) menunjukkan kapasitas internal yang kuat.

2. Lingkungan eksternal memberikan peluang besar

Pertumbuhan ekonomi syariah, perkembangan industri halal dan wisata halal, modal sosial masyarakat religius, otonomi pengelolaan perguruan tinggi, serta peluang kolaborasi dengan PTKI, pemerintah, dan swasta menciptakan eksternalitas positif yang signifikan.

3. Kelemahan dan ancaman bersifat *manageable*

Kelemahan seperti OBE yang belum optimal, integrasi layanan, dan kompetensi bahasa asing lulusan merupakan isu penguatan tata kelola dan mutu, bukan keterbatasan struktural. Ancaman yang ada lebih menuntut adaptasi strategis (digitalisasi, *soft skills*, integrasi keilmuan), bukan menghambat secara fundamental.

UIN Imam Bonjol Padang berada pada fase *agresif-ekspansif*, yaitu: memaksimalkan kekuatan internal untuk menangkap peluang eksternal. (Sumber : Renstra UIN Imam Bonjol Padang 2025 – 2029 Hal. 25 – 35.)

H. Sistematika Pelaporan

Berdasarkan **Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021** tentang *Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama*, **Laporan Kinerja UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2025** disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menyajikan gambaran umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis UIN Imam Bonjol Padang. Uraian meliputi kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta isu-isu strategis (*strategic issues*) dan permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi institusi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan Rencana Strategis UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2020–2024 beserta perubahan terhadap rencana strategis tersebut berdasarkan hasil reviu. Selain itu, bab ini memuat ringkasan atau ikhtisar Perjanjian Kinerja UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan dan pengukuran kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini disusun ke dalam tiga bagian. Bagian pertama menguraikan capaian kinerja organisasi, yang memuat hasil pengukuran kinerja UIN Imam Bonjol Padang atas setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Tahun 2025, disertai analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja tersebut. Bagian kedua menyajikan capaian kinerja lainnya yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Bagian ketiga menguraikan capaian anggaran, yang memuat informasi mengenai realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab IV Penutup

Bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja UIN Imam Bonjol Padang selama Tahun 2025 serta rekomendasi strategis sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 – 2029

Pemerintah melalui Kementerian Agama yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui peningkatan mutu pendidikan dan keagamaan dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada RPJMN Tahun 2025 – 2029 yaitu **“Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”**. Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia 2025 – 2029 adalah **“Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Maslahat, dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Berlandaskan pada tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama merumuskan dan menyusun misi untuk mendukung pencapaian delapan misi Presiden dan Wakil Presiden, adapun misi Kementerian Agama 2025 – 2029 sebagai berikut:

Misi 1 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan;

Misi 2 Meningkatkan kualitas pendidikan agama, pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan keagamaan dan pesantren; dan

Misi 3 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Misi Kementerian Agama 2025 – 2029 merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi besar Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Maslahat, dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Misi ini dirancang untuk menjembatani gagasan besar visi ke dalam program kerja nyata yang dapat diimplementasikan secara berkesinambungan. Setiap misi mencerminkan upaya konkret untuk mendukung elemen dalam visi, yaitu menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan cerdas.

Terkait dengan ini Kemenag melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025 – 2029, yang meliputi: **1) Kerukunan dan cinta kemanusiaan, 2) Ekoteologi,**

- 3) Layanan keagamaan berdampak, 4) **Pendidikan unggul, ramah dan terintegrasi**, 5) Pesantren berdaya, 6) Pemberdayaan ekonomi umat, 7) Pemberdayaan rumah ibadah, dan, **8) Digitalisasi tata kelola.**

Tujuan ini diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan di bidang agama dan pendidikan, serta memperkuat kontribusi Kementerian Agama dalam pembangunan nasional. Berikut adalah tujuan-tujuan strategis tersebut:

-
- Tujuan 1 Mewujudkan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui pemahaman agama yang moderat.
-
- Tujuan 2 Meningkatkan kualitas umat beragama melalui pelayanan keagamaan, ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi umat secara adil dan inklusif.
-
- Tujuan 3 Meningkatkan akses pendidikan yang terintegrasi, ramah, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat
-
- Tujuan 4 Meningkatkan mutu dan daya saing lembaga pendidikan dan pesantren agar lebih unggul dan mandiri.
-
- Tujuan 5 Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan berbasis digital, yang melayani dan profesional.
-

Dengan lima tujuan strategis ini, Kementerian Agama berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional. Melalui upaya peningkatan kualitas pendidikan, layanan keagamaan, tata kelola birokrasi, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Kementerian Agama dapat mewujudkan visi Indonesia yang maju, inklusif, dan berkeadilan, serta berkontribusi langsung pada pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapai Sasaran Strategis Kementerian Agama tahun 2025 – 2029, Ditjen Pendidikan Islam telah menetapkan delapan Sasaran Program yaitu:

1. Meningkatnya partisipasi peserta didik pada UIN Imam Bonjol Padang.
2. Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu.
3. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
4. Meningkatnya daya saing lulusan UIN Imam Bonjol Padang.
5. Meningkatnya relevansi pendidikan tinggi keagamaan melalui penguatan kemitraan strategis.

6. Meningkatnya kualitas karakter keagamaan mahasiswa yang ramah, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan.
7. Meningkatnya produktivitas dan daya saing Pendidikan Tinggi Keagamaan.
8. Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel.

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, sebagai bagian tak terpisahkan dari Kemenag, memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengembangkan serta mewujudkan misi dan target strategis pendidikan tinggi yang telah ditetapkan sesuai dengan arah dan kebijakan yang berlaku. Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang besar, percepatan perkembangan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang membutuhkan fleksibilitas organisasi yang lebih dinamis.

Universitas Imam Bonjol Padang menetapkan visinya berdasarkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang **“Menjadi Imam, Berdayaguna, dan Berbudaya dalam Membangun Masyarakat yang Rukun, Maslahat dan Cerdas Tahun 2040”**.

Guna mewujudkan visi tersebut, UIN Imam Bonjol Padang menyusun empat misi yaitu melalui:

-
- | | |
|--------|---|
| Misi 1 | Menyelenggarakan Pendidikan berdampak yang memanusiakan peserta didik dalam mengembangkan potensinya sebagai khalifah fil ardh. |
| <hr/> | |
| Misi 2 | Mengembangkan riset inovatif, transformatif, partisipatif, dan berdayaguna yang berdampak pada penguatan kehidupan ilmiah dan memaslahatan. |
| <hr/> | |
| Misi 3 | Melaksanakan pengabdian yang berdampak pada keberdayaan, kesejahteraan, dan ketahanan ummat melalui kerja kolaboratif, dan sinergis kampus-masyarakat-pemangku kepentingan. |
| <hr/> | |
| Misi 4 | Memantapkan tata kelola akademik yang berdampak pada pengelolaan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara baik, berkelanjutan, dan berkemanusiaan. |
-

Formulasi visi dan misi yang lebih operasional dideskripsikan di dalam tujuan Renstra UIN Imam Bonjol 2025 – 2029, yang meliputi:

Tujuan 1	Peningkatan Pendidikan berdampak yang memanusiakan peserta didik dalam mengembangkan potensinya sebagai khalifah fil ardh.
Tujuan 2	Pengembangkan riset inovatif, transformatif, partisipatif, berdaya guna, dan berdampak pada penguatan kehidupan ilmiah dan kemaslahatan.
Tujuan 3	Peningkatan pengabdian yang berdampak pada keberdayaan, kesejahteraan, dan ketahanan umat melalui kerja kolaboratif dan sinergis kampus-masyarakat-pemangku kepentingan.
Tujuan 4	Peningkatan kualitas tata Kelola perguruan tinggi melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital terintegrasi.

B. Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaan Renstra UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2025 – 2029, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan UIN Imam Bonjol Padang dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan. Rumusan pengukuran yang digunakan berisi berbagai informasi mengenai variabel, cara, penanggung jawab, dan sumber data indikator kinerja sasaran program. Adapun perumusan pengukuran adalah sebagai berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025 UIN Imam Bonjol Padang

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada Pendidikan Tinggi	Persentase peningkatan mahasiswa pada PTK	15
		Persentase peningkatan mahasiswa berkebutuhan khusus pada PTK	0,05
2		Persentase Prodi yang mendapatkan akreditasi A/unggul	20

	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu	Persentase lulusan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi	90
		Persentase PTK yang melaksanakan sistem penjaminan mutu	100
		Persentase PTK yang melaksanakan standar manajemen kelembagaan	100
		persentase mahasiswa PTK yang memiliki tingkat kemampuan literasi keagamaan minimal baik	80
3	Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas	Persentase dosen PTK yang memperoleh sertifikasi pendidik	95
		Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi	75
4	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja	Persentase lulusan PTK yang berhasil memiliki pekerjaan atau berwiraswasta	80
5	Meningkatnya kerjasama PTK	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dalam tri darma	80
6	Meningkatnya produktivitas dan daya saing Pendidikan Tinggi	Persentase artikel jurnal bereputasi nasional yang disitasi	80
		Persentase PTK yang berkontribusi pada pencapaian SDGs	2
7	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	Predikat Opini Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	66

	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2.5
	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	50
	Indeks Pelayanan Publik	30
	Indeks BerAkhlak	61
	Tingkat Manuritas Statistik Sektoral	2,6
	Tingkat implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI)	60
	Nilai Kinerja Anggaran	83

No.	Program	Anggaran
1	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Rp. 156.709.377.000
2	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	Rp. 97.922.000.000
	Jumlah Seluruh	Rp. 254.631.377.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2025–2029 dan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014, Peraturan Menpan RB No. 53 Tahun 2014, serta KMA No. 94 Tahun 2021, maka capaian kinerja UIN Imam Bonjol Padang tahun 2024 diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Kontrak Kinerja tahun 2024. Pengukuran tersebut dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian terhadap target yang telah ditetapkan untuk setiap indikator kinerja utama (IKU) yang tercantum dalam Renstra dan dokumen kinerja tahunan. Hasil pengukuran ini menjadi dasar penilaian akuntabilitas kinerja serta evaluasi keberhasilan pelaksanaan program universitas. Dengan demikian, penilaian kinerja tahun 2024 telah diselaraskan dengan kerangka Renstra 2025–2029 sebagai dasar perencanaan berkelanjutan dan peningkatan akuntabilitas kinerja institusi.

1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

Tabel Capaian Kinerja 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
III. 025.04.DK Program Pendidikan Tinggi					
1	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama	75	90	120%
2	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan	Persentase dosen bersertifikat pendidik	85,78	82,4	96%
		Persentase dosen berkualifikasi S3	41,82	46,13	110%
3	Meningkatkan partisipasi peserta didik pada satuan Pendidikan	Persentase peningkatan mahasiswa pada UIN Imam Bonjol Padang	10	32,35	324%

4	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu Pendidikan	Persentase Prodi PTK yang terakreditasi A/Unggul	28,26	10,87	38%
		Persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan	65	95,65	147%
5	Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional	Persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional	10	0	0
		Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK	0,2	53,85	26925%
6	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja	Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan	6	10	167%
		Rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa PTK			
		a. S1	3,49	3,35	96%
		b. S2	3,58	3,53	99%
		c. S3	3,63	3,67	101%
		Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan	5	5	100%
7	Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional	20	51,16	256%
IV. 025.04.WA Program Dukungan Manajemen					
8	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	96	100	104%
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	85	0	0
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja	78	65,98	85%

	Instansi Pemerintah (SAKIP)			
	Nilai Maturitas SPIP	2	2,93	147%
	Indeks Profesionalitas ASN	65	65	100%

Berdasarkan data tersebut di atas, kita bisa melihat beberapa keberhasilan yang dicapai oleh UIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2023, diantaranya:

1. **Program Pendidikan Tinggi** : tujuan dari program ini adalah untuk melihat keberhasilan dalam pelaksanaan program dalam pendidikan tinggi. Indikator keberhasilan yang terlihat adalah:
 - a. **Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat**: Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama mencapai 90, melampaui target 75 dengan capaian 120%. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan berbasis moderasi beragama telah berjalan efektif dan mampu meningkatkan pemahaman serta internalisasi nilai-nilai moderasi pada peserta didik.
 - b. **Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan**: Persentase dosen bersertifikat pendidik mencapai 82,4% atau 96% dari target, yang menunjukkan bahwa sebagian besar dosen telah memenuhi standar profesional, meskipun masih diperlukan upaya lanjutan untuk mencapai target yang ditetapkan. Sementara itu, persentase dosen berkualifikasi S3 mencapai 46,13%, melampaui target 41,82% dengan capaian 110%, mencerminkan keberhasilan institusi dalam mendorong peningkatan kualifikasi akademik tenaga pendidik.
 - c. **Meningkatkan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan**: Persentase peningkatan jumlah mahasiswa di UIN Imam Bonjol Padang mencapai **32,35%**, jauh melampaui target **10%** dengan capaian **324%**. Capaian ini menunjukkan meningkatnya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi, sekaligus menuntut pengelolaan yang lebih optimal terhadap kapasitas dan kualitas layanan pendidikan.
 - d. **Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan**: Persentase program studi PTK yang terakreditasi A/**Unggul baru** mencapai **10,87%** atau **38% dari target**, menunjukkan bahwa

peningkatan mutu program studi melalui akreditasi unggul masih perlu diperkuat. Namun demikian, persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan mencapai **95,65%**, melampaui target **65%** dengan capaian **147%**, yang mengindikasikan bahwa penerapan sistem penjaminan mutu internal telah berjalan dengan sangat baik.

- e. **Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional:** Persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional belum menunjukkan capaian (**0%**), sehingga menjadi perhatian utama dalam upaya internasionalisasi institusi. Sebaliknya, persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK mencapai **53,85%**, jauh melampaui target **0,2%** dengan capaian **26.925%**, yang menunjukkan tingginya potensi daya tarik institusi di tingkat internasional meskipun belum sepenuhnya diiringi pengakuan reputasi global.
- f. **Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja:** Persentase PTK yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan mencapai **10%**, melampaui target **6%** dengan capaian **167%**, menunjukkan penguatan keterkaitan antara pendidikan tinggi dan kebutuhan pasar kerja. Rerata IPK lulusan program **S1** dan **S2** masing-masing mencapai **96%** dan **99% dari target**, sementara lulusan **S3** melampaui target dengan capaian **101%**, mencerminkan mutu akademik lulusan yang relatif stabil. Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan tercapai sesuai target, yaitu **5 bulan (100%)**, yang menunjukkan daya serap lulusan yang cukup baik di dunia kerja.
- g. **Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian:** Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional mencapai **51,16%**, melampaui target **20%** dengan capaian **256%**. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas dan pemanfaatan hasil penelitian, serta komitmen institusi dalam pengembangan budaya riset dan publikasi ilmiah.

- 2. **Program Dukungan Manajemen :** Pada tahun 2023, program "Dukungan Manajemen" (025.04.WA) UIN Imam Bonjol Padang menetapkan sasaran "**Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan**

akuntabel" yang diukur melalui lima indikator kinerja utama. Capaian terhadap kelima indikator tersebut menunjukkan kinerja yang beragam, dengan beberapa keberhasilan signifikan dan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian:

- a. **Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang diselesaikan :** Berdasarkan tabel terlihat bahwa target pada indikator ini adalah 96% dimana realisasi berada pada angka 100% dan capaian berada pada 104%. Hal ini menunjukkan bahwa UIN Imam Bonjol Padang berhasil melampaui target dengan menyelesaikan seluruh tindak lanjut hasil pemeriksaan. Capaian ini menunjukkan komitmen tinggi terhadap akuntabilitas dan responsif terhadap temuan audit. Hal ini mencerminkan budaya organisasi yang proaktif dalam perbaikan sistem pengelolaan keuangan dan administrasi.
- b. **Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB):** Berdasarkan data ditemukan bahwa target sasaran adalah 85 dan realisasi 0 serta capaian yang dihasilkan adalah 0%. Berdasarkan data disimpulkan Indikator ini sama sekali tidak tercapai karena aplikasi atau mekanisme pengukuran PMPRB tidak aktif sejak tahun 2020. Ini merupakan kendala sistemik di tingkat nasional yang menghambat kemampuan universitas untuk melakukan penilaian mandiri reformasi birokrasi. Perlu koordinasi dengan instansi terkait untuk mengaktifkan kembali sistem pengukuran ini.
- c. **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):** berdasarkan target yang diterapkan sebanyak 78, maka realisasi adalah 65,98 dan capaian 85%. Dimana berdasarkan data tersebut Nilai SAKIP yang dicapai masih **di bawah target**, meskipun sistem telah berjalan. Hal ini mengindikasikan **perlu peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Pelatihan dan sosialisasi SAKIP** yang lebih intensif serta **penguatan sistem monitoring** dapat membantu meningkatkan capaian di masa mendatang.
- d. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): dimana Target yang ditetapkan adalah 78, Realisasi pada angka 65,98 serta capaian sebanyak 85%. Hal ini berarti bahwa Nilai SAKIP yang dicapai masih di bawah target, meskipun sistem telah berjalan. Hal ini mengindikasikan perlu

peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Pelatihan dan sosialisasi SAKIP yang lebih intensif serta penguatan sistem monitoring dapat membantu meningkatkan capaian di masa mendatang.

- e. **Indeks Profesionalitas ASN:** berdasarkan data maka target yang dipasang adalah pada angka 65, dimana **realisasi di angka 65**, serta **Capaian: 100%**. Indikator ini **tepat tercapai sesuai target**, mencerminkan bahwa tingkat profesionalitas ASN di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang **telah sesuai dengan standar yang ditetapkan**. Ini merupakan **modal penting untuk tata kelola yang baik** dan menunjukkan bahwa **program pengembangan kompetensi ASN berjalan efektif**.

2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

Berikut merupakan analisis capaian perjanjian kinerja UIN Imam Bonjol Padang:

Tabel Capaian Kinerja 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
III. 025.04.DK Program Pendidikan Tinggi				
1	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat (SP.5.1)	Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama	90	92
		Persentase pemahaman moderasi beragama pada Mahasiswa Strata Satu PTKI	90	92
2	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan (SP.5.2)	Persentase dosen bersertifikat pendidik	82.40	91,75
		Persentase dosen berkualifikasi S3	46.13	48,19
3	Meningkatnya kualitas standar dan sistem	Persentase Prodi PTK yang terakreditasi A/Unggul	20	23,91

	penjaminan mutu pendidikan (SP.5.3)	Persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan	100	100
4	Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional (SP.5.4)	Persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional	6.52	0
		Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK	53.85	115,38
5	Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian (SP.5.5)	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional	65	62.57
6	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja (SP.5.6)	Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan	15	100
		Rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa PTK		
		a. S1	3.35	3.54
		b. S2	3.50	3.63
		c. S3	3.60	3.65
	Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan	5	5	
7	Meningkatkan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan (SP.4.1)	Persentase peningkatan mahasiswa pada PTK	15	- 26. 9
IV. 025.04.WA Program Dukungan Manajemen				
8	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel (SP.1.6)	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	100	100
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	0	0
9	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi

	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	66	50,7
	Nilai Maturitas SPIP	2.5	2.14
	Indeks Profesionalitas ASN	65	65

1. **Program Penguatan Sistem Pendidikan Moderat:** Program ini bertujuan memperkuat sistem pendidikan yang mengadopsi perspektif moderasi beragama. Indikator kinerja yang digunakan adalah rerata nilai ujian mata kuliah keagamaan bermuatan moderasi beragama pada PTK/PTU. Target yang ditetapkan sebesar 90 berhasil terlampaui dengan realisasi 92 pada akhir tahun. Peningkatan target ini didasarkan pada capaian tahun 2023 yang mencapai nilai 90 dari target awal 75. Pengukuran dilakukan dengan membagi total nilai ujian mata kuliah keagamaan bermuatan moderasi beragama dengan jumlah mahasiswa.
2. **Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik:** Program ini bertujuan meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui dua indikator kinerja utama. Persentase dosen bersertifikat pendidik ditargetkan 82,40% dan terealisasi 91,75%, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024, dari total 388 dosen, sebanyak 356 dosen telah memiliki sertifikat pendidik. Indikator kedua adalah persentase dosen berkualifikasi S3 dengan target 46,13% dan realisasi 48,19%. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah dosen bersertifikat dan lulusan S3 dengan total dosen.
3. **Program Peningkatan Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan:** Program ini bertujuan meningkatkan kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan. Indikator pertama adalah persentase program studi terakreditasi A/unggul dengan target 20% dan realisasi 23,91%. Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencapai 10,87%. Dari total 46 program studi, sebanyak 11 program studi telah terakreditasi unggul. Indikator kedua menunjukkan 100% program studi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan melalui audit mutu internal.

4. **Program Peningkatan Reputasi Internasional PTK:** Program ini bertujuan meningkatkan kualitas PTK agar memiliki reputasi internasional. Indikator persentase program studi berperingkat internasional ditargetkan 6,52% namun belum tercapai dengan realisasi 0%. Saat ini, UIN Imam Bonjol Padang baru melaksanakan kerja sama internasional seperti pertukaran pelajar dan magang luar negeri. Program studi terakreditasi unggul direncanakan menjadi prioritas pengembangan menuju reputasi internasional. Indikator kedua berhasil melampaui target dengan peningkatan mahasiswa asing sebesar 115,38% dari target 53,85%.
5. **Program Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Penelitian:** Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pemanfaatan hasil penelitian. Indikator kinerja berupa persentase jurnal terakreditasi nasional ditargetkan 65% dengan realisasi 62,57%. Meskipun target belum sepenuhnya tercapai, capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2023, realisasi hanya sebesar 51,16% dari target 20%. Dari total 42 jurnal yang dimiliki, sebanyak 27 jurnal telah terakreditasi nasional. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah jurnal terakreditasi dengan total jurnal.
6. **Program Peningkatan Kualitas Lulusan PTK:** Program ini bertujuan meningkatkan kualitas lulusan PTK yang terserap di dunia kerja. Indikator kerja sama PTK dengan dunia kerja memiliki target 15% dan berhasil terealisasi 100%. Indikator rerata IPK lulusan juga tercapai pada semua jenjang, yaitu S1 sebesar 3,54, S2 sebesar 3,63, dan S3 sebesar 3,65. Seluruh capaian IPK tersebut melampaui target yang ditetapkan. Indikator masa tunggu lulusan sebelum bekerja tercapai sesuai target, yaitu rata-rata 5 bulan.
7. **Program Peningkatan Partisipasi Peserta Didik:** Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi mahasiswa di UIN Imam Bonjol Padang. Target peningkatan mahasiswa sebesar 15% tidak tercapai dengan realisasi -26,9%. Jumlah mahasiswa baru menurun dari 4.569 orang pada tahun 2023 menjadi 3.339 orang pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan selisih sebesar 1.230 mahasiswa. Kondisi tersebut menjadi perhatian manajemen untuk mengidentifikasi penyebab dan merumuskan strategi perbaikan.

8. **Program Peningkatan Tata Kelola Organisasi:** Program ini bertujuan meningkatkan tata kelola organisasi agar lebih efektif dan akuntabel. Indikator tindak lanjut hasil pemeriksaan berhasil mencapai target 100%. Namun, beberapa indikator lain belum optimal akibat kendala teknis dan sistemik. Nilai SAKIP belum mencapai target dengan realisasi 50,7 dari target 66, sedangkan nilai maturitas SPIP mencapai 2,14 dari target 2,5. Indeks profesionalitas ASN berhasil mencapai target dengan nilai 65.

3. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Tabel Capaian Kinerja tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	Program /Kegiatan	Program/Kegiatan			
1	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada Pendidikan Tinggi	Persentase peningkatan mahasiswa pada PTK	15	16,26	108
		Persentase peningkatan mahasiswa berkebutuhan khusus pada PTK	0,05	0,05	100
2	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu	Persentase Prodi yang mendapatkan akreditasi A/unggul	20	21	105
		Persentase lulusan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi	90	0,03	0.03
		Persentase PTK yang melaksanakan sistem penjaminan mutu	100	100	100
		Persentase PTK yang melaksanakan standar manajemen kelembagaan	100	100	100
		Persentase mahasiswa PTK yang memiliki tingkat kemampuan literasi keagamaan minimal baik	80	73	91.25

3	Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas	Persentase dosen PTK yang memperoleh sertifikasi pendidik	95	95	100
		Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi	75	45	60
4	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja	Persentase lulusan PTK yang berhasil memiliki pekerjaan atau berwiraswasta	80	4,65	5.82
5	Meningkatnya Kerjasama PTK	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dalam tri darma	80	17	21
6	Meningkatnya produktivitas dan daya saing Pendidikan Tinggi	Persentase artikel jurnal bereputasi nasional yang disitasi	80	81,23	102
		Persentase PTK yang berkontribusi pada pencapaian SDGs	2	2	100
7	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	Predikat Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	66	90	136
		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2,5	2,98	119
		Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	50	80	160
		Indeks Pelayanan Publik	30	91,4	305
		Indeks BerAkhlak	61	88,09	144.4
		Tingkat Maturitas Statistik Sektoral	2,6	0	0
		Tingkat implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI)	60	0	0
		Nilai Kinerja Anggaran	83	91	110

1. Meningkatnya partisipasi peserta didik pada Pendidikan Tinggi : Program pertama ini memiliki dua indikator yaitu : Peningkatan jumlah mahasiswa secara keseluruhan. indikator ketercapaian menunjukkan bahwa keberhasilan pada angka 16,26%. capaian ini tidak hanya memenuhi tetapi melampaui target yang ditetapkan sebesar 15%. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi dan kebijakan yang diterapkan seperti perluasan daya tampung, peningkatan relevansi program studi serta efektifitas promosi dan layanan penerimaan mahasiswa baru telah berjalan dengan optimal; Pemerataan akses bagi mahasiswa berkebutuhan khusus merupakan indikator kedua yang memfokuskan kepada indikator pemerataan dan inklusivitas, yaitu peningkatan mahasiswa berkebutuhan khusus yang sangat tepat sasaran. pada tabel terlihat bahwa target yang ditetapkan sebesar 0,05% berhasil dicapai secara penuh dengan realisasi yang sama, yaitu 0,05%. pencapaian ini membuktikan adanya komitmen serta upaya konkret dalam membuka akses pendidikan yang lebih luas, serta menciptakan ekosistem pembelajaran yang inklusif dan ramah bagi seluruh kalangan masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu : program kedua ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas standar dan sistem penjaminan mutu di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang. tabel diatas menunjukkan bahwa adanya hasil yang sangat kontras terkait dengan pencapaian kelembagaan dan kompetensi lulusan : **Capaian Sangat Baik di Bidang Kelembagaan dan Sistem**, hal ini ditunjukkan dengan 1) Akreditasi Program Studi: Persentase program studi (Prodi) yang meraih akreditasi A atau Unggul mencapai 21%, melampaui target sebesar 20%. Ini menunjukkan peningkatan kualitas akademik yang diakui secara eksternal, 2) Implementasi Sistem Mutu dan Manajemen: Dua indikator kunci kelembagaan, yaitu pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan standar manajemen kelembagaan, berhasil mencapai target sempurna 100%. Hal ini membuktikan bahwa fondasi sistem tata kelola dan proses penjaminan mutu internal telah diterapkan secara merata dan kuat di semua lingkup UIN Imam Bonjol Padang; **Capaian yang Mengkhawatirkan di Bidang Outcome dan Kompetensi** : 1) Sertifikasi Kompetensi Lulusan: Terdapat kesenjangan yang sangat ekstrem antara target

dan realisasi. Target sebesar 90% untuk lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga bereputasi, nyatanya hanya tercapai 0,03%. Ini mengindikasikan kegagalan sistemik dalam menyiapkan, mengarahkan, atau memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan pengakuan kompetensi dari pasar kerja atau industri. Indikator ini merupakan titik kritis yang memerlukan evaluasi mendesak. 2) Literasi Keagamaan Mahasiswa: tabel menunjukkan bahwa capaian tingkat kemampuan literasi keagamaan minimal baik (73%) masih berada di bawah target 80%. Hal ini menunjukkan bahwa meski sistem telah berjalan, outcome pembelajaran pada aspek inti keagamaan masih perlu ditingkatkan kualitas dan efektivitasnya.

3. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas : Program ketiga ini bertujuan dalam meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. Berdasarkan data yang tersaji, capaian dalam upaya meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan menunjukkan hasil yang beragam, dengan pencapaian sempurna pada aspek kualifikasi dasar, namun kinerja yang sangat kurang pada aspek pengembangan dan peningkatan kompetensi berkelanjutan: **Capaian Optimal pada Sertifikasi Dasar Pendidik:** pada program ini Indikator utama keberhasilan, yaitu persentase dosen yang telah memperoleh sertifikasi pendidik. berdasarkan data terlihat bahwa UIN Imam Bonjol Padang berhasil mencapai target secara tepat sebesar 95%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa komitmen untuk memastikan kualifikasi akademik dan pedagogik dasar bagi tenaga pengajar telah terpenuhi dengan baik; **Tantangan Besar dalam Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan:** dimana indikator strategis untuk pengembangan sumber daya manusia, yaitu persentase dosen dan tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi, menunjukkan kinerja yang jauh dari memadai. Target yang ditetapkan sebesar 75% hanya dapat dicapai sebesar 45%, atau hanya mencapai 60% dari target yang diharapkan. Kesenjangan yang signifikan ini mengindikasikan adanya hambatan serius dalam program pengembangan kapasitas, baik dari sisi

akses, fasilitasi, insentif, maupun efektivitas kebijakan yang mendorong peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.

4. Meningkatnya lulusan PTK yang diterima di dunia kerja : Program ke empat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan yang diterima di dunia kerja. Berdasarkan data yang tersaji, capaian terhadap sasaran utama peningkatan kualitas lulusan yang diterima di dunia kerja menunjukkan hasil yang sangat mengkhawatirkan dan jauh dari harapan, menandakan adanya kesenjangan kritis antara proses pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. hal ini terlihat dari : **Kinerja yang Sangat Jauh dari Target:** Indikator kinerja utama (IKU) ini, yaitu persentase lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang berhasil bekerja atau berwiraswasta, hanya mencapai 4,65%, angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 80%. Capaian ini berarti hanya sekitar 5.8% dari target yang berhasil dipenuhi. Kesenjangan yang ekstrem ini tidak hanya menunjukkan ketidakcapaian target, tetapi lebih jauh mengisyaratkan potensi kegagalan sistemik dalam menyiapkan lulusan untuk bersaing dan diserap oleh dunia kerja.
5. Meningkatnya kerjasama PTK : program ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK). Indikator kinerja yang mengukur efektivitas tindak lanjut kerja sama dalam pelaksanaan Tri Dharma (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) hanya mencapai 17%. Angka ini sangat jauh dari target yang ditetapkan sebesar 80%, yang berarti baru sekitar 21% dari target yang berhasil dipenuhi. Kesenjangan yang lebar ini menunjukkan bahwa sebagian besar kerja sama yang telah disepakati tidak dioperasionalkan atau tidak menghasilkan aktivitas riil yang berkontribusi pada inti misi perguruan tinggi.
6. Meningkatnya produktifitas dan daya saing PTK : program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan Tinggi. capaian dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan Tinggi menunjukkan hasil yang solid dan memenuhi ekspektasi, dengan pencapaian yang konsisten pada kedua indikator yang mengukur aspek output penelitian dan kontribusi sosial global. Indikator keberhasilan adalah : **Peningkatan**

Reputasi dan Dampak Penelitian: Indikator produktivitas penelitian, yaitu persentase artikel jurnal bereputasi nasional yang disitasi, berhasil mencapai 81,23%. Capaian ini tidak hanya memenuhi, tetapi sedikit melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 80%. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa penelitian yang dihasilkan oleh akademisi Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) tidak hanya dipublikasikan pada saluran bereputasi, tetapi juga mendapatkan perhatian dan digunakan sebagai rujukan oleh komunitas akademik nasional. Hal ini merupakan indikator kualitas dan relevansi dari output penelitian yang dihasilkan; **Pemenuhan Komitmen terhadap Kontribusi Global:** Indikator yang mengukur kontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) berhasil mencapai target secara tepat, yaitu 2%. Pencapaian target ini menunjukkan bahwa PTK telah memulai langkah konkret untuk mengarahkan aktivitas tridharmanya terutama pada aspek penelitian dan pengabdian masyarakat agar selaras dan berkontribusi pada agenda pembangunan global yang lebih luas. Hal ini mencerminkan peningkatan kesadaran dan upaya institusi untuk memiliki daya saing dan relevansi yang berskala internasional.

7. Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel : program ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola organisasi. Berdasarkan data yang disajikan, capaian dalam upaya meningkatkan tata kelola organisasi menunjukkan hasil yang sangat luar biasa dan melebihi ekspektasi secara dominan. Dari sembilan indikator yang diukur, tujuh indikator melampaui target secara signifikan, sementara dua indikator lainnya sama sekali belum menunjukkan capaian : **Pencapaian yang Sangat Gemilang dan Melampaui Target:** hal ini terlihat pada beberapa indikator yaitu Opini Laporan Keuangan mencapai predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), yang merupakan standar tertinggi akuntabilitas keuangan, Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) melonjak ke nilai 90, jauh melampaui target 66, Pengendalian Intern (SPIP) mencapai maturitas 2.98, melampaui target 2.5 dan mendekati level 3 (terdefinisi), Transformasi Digital (SPBE) menunjukkan implementasi 80%, melampaui target 50%, Kualitas Pelayanan Publik melesat dengan indeks 91.4, jauh di atas target 30, Nilai Integritas

(Indeks BerAKHLAK) mencapai 88.09, mengungguli target 61 dan Kinerja Anggaran mencapai nilai 91, melampaui target 83. sebaliknya, indikator yang tidak tercapai menunjukkan adanya **Kesenjangan Kritis pada Aspek Tata Kelola Data** yang ditunjukkan oleh indikator : Tingkat Maturitas Statistik Sektoral: Realisasi 0 dari target 2.6; Implementasi Satu Data Indonesia (SDI): Realisasi 0 dari target 60. Kontras yang sangat tajam ini mengungkap titik lemah utama: sistem tata kelola data yang belum terbangun. Sementara tata kelola proses, keuangan, dan layanan sudah sangat maju, pengelolaan data sebagai aset strategis masih terabaikan. Hal ini berisiko menyebabkan ketidakefisienan, duplikasi, dan pengambilan keputusan yang kurang berbasis data.

4. Analisis Realisasi Kinerja Tahun 2023 - 2025 dan Target Kinerja Renstra 2026

a. Perbandingan Trend Capaian Utama (3 Periode)

Aspek Kinerja	Indikator Kunci	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Analisis Trend
Partisipasi Mahasiswa	% Peningkatan Mahasiswa PTK	32,35% (324%)	26,9%	16,26% (108%)	Penurunan signifikan dari puncak 324% ke 108%
Kualitas Dosen	% Dosen Sertifikat Pendidik	82,4% (96%)	91,75%	95% (100%)	Peningkatan konsisten mendekati target maksimal
	% Dosen S3	46,13% (110%)	48,19%	-	Peningkatan bertahap
Akreditasi Unggul	% Prodi Akreditasi A/Unggul	10,87% (38%)	23,91%	21% (105%)	Peningkatan signifikan dari 38% ke 105%
Kerjasama Industri	% PTK Kerjasama Industri	10% (167%)	100%	-	Peningkatan luar biasa (dari 6% target)
Penempatan Kerja	% Lulusan Bekerja/Berwirausaha	-	-	4,65% (5,82%)	Peringatan serius (sangat jauh dari target 80%)

Reputasi Internasional	% PTK Rangking Internasional	0% (0%)	0%	-	Tidak ada kemajuan selama 3 tahun
Mahasiswa Asing	% Peningkatan Mahasiswa Asing	53,85% (26925%)	115,38%	-	Capaian fantastis, namun perlu dipertahankan
Penelitian	% Jurnal Terakreditasi Nasional	51,16% (256%)	62,57%	81,23% (102%)	Peningkatan konsisten kualitas publikasi
Tata Kelola	Nilai SAKIP	65,98% (85%)	50,7%	90% (136%)	Fluktuatif , tetapi akhirnya melampaui target
	Maturitas SPIP	2,93 (147%)	2,14	2,98 (119%)	Peningkatan setelah penurunan di tahun 2021

1. **Program Penguatan Sistem Pendidikan Moderat:** Program ini bertujuan memperkuat sistem pendidikan yang mengadopsi perspektif moderasi beragama. Indikator kinerja yang digunakan adalah rerata nilai ujian mata kuliah keagamaan bermuatan moderasi beragama pada PTK/PTU. Target yang ditetapkan sebesar 90 berhasil terlampaui dengan realisasi 92 pada akhir tahun. Peningkatan target ini didasarkan pada capaian tahun 2023 yang mencapai nilai 90 dari target awal 75. Pengukuran dilakukan dengan membagi total nilai ujian mata kuliah keagamaan bermuatan moderasi beragama dengan jumlah mahasiswa.
2. **Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik:** Program ini bertujuan meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui dua indikator kinerja utama. Persentase dosen bersertifikat pendidik ditargetkan 82,40% dan terealisasi 91,75%, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024, dari total 388 dosen, sebanyak 356 dosen telah memiliki sertifikat pendidik. Indikator kedua adalah persentase dosen berkualifikasi S3 dengan target 46,13% dan realisasi 48,19%. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah dosen bersertifikat dan lulusan S3 dengan total dosen.
3. **Program Peningkatan Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan:** Program ini bertujuan meningkatkan kualitas standar dan sistem penjaminan

mutu pendidikan. Indikator pertama adalah persentase program studi terakreditasi A/unggul dengan target 20% dan realisasi 23,91%. Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencapai 10,87%. Dari total 46 program studi, sebanyak 11 program studi telah terakreditasi unggul. Indikator kedua menunjukkan 100% program studi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan melalui audit mutu internal.

4. **Program Peningkatan Reputasi Internasional PTK:** Program ini bertujuan meningkatkan kualitas PTK agar memiliki reputasi internasional. Indikator persentase program studi berperingkat internasional ditargetkan 6,52% namun belum tercapai dengan realisasi 0%. Saat ini, UIN Imam Bonjol Padang baru melaksanakan kerja sama internasional seperti pertukaran pelajar dan magang luar negeri. Program studi terakreditasi unggul direncanakan menjadi prioritas pengembangan menuju reputasi internasional. Indikator kedua berhasil melampaui target dengan peningkatan mahasiswa asing sebesar 115,38% dari target 53,85%.

5. **Program Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Penelitian** Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pemanfaatan hasil penelitian. Indikator kinerja berupa persentase jurnal terakreditasi nasional ditargetkan 65% dengan realisasi 62,57%. Meskipun target belum sepenuhnya tercapai, capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2023, realisasi hanya sebesar 51,16% dari target 20%. Dari total 42 jurnal yang dimiliki, sebanyak 27 jurnal telah terakreditasi nasional. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah jurnal terakreditasi dengan total jurnal.

6. **Program Peningkatan Kualitas Lulusan PTK:** Program ini bertujuan meningkatkan kualitas lulusan PTK yang terserap di dunia kerja. Indikator kerja sama PTK dengan dunia kerja memiliki target 15% dan berhasil terealisasi 100%. Indikator rerata IPK lulusan juga tercapai pada semua jenjang, yaitu S1 sebesar 3,54, S2 sebesar 3,63, dan S3 sebesar 3,65. Seluruh capaian IPK tersebut melampaui target yang ditetapkan. Indikator masa tunggu lulusan sebelum bekerja tercapai sesuai target, yaitu rata-rata 5 bulan.

7. **Program Peningkatan Partisipasi Peserta Didik:** Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi mahasiswa di UIN Imam Bonjol Padang. Target peningkatan mahasiswa sebesar 15% tidak tercapai dengan realisasi -26,9%. Jumlah mahasiswa baru menurun dari 4.569 orang pada tahun 2023 menjadi 3.339 orang pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan selisih sebesar 1.230 mahasiswa. Kondisi tersebut menjadi perhatian manajemen untuk mengidentifikasi penyebab dan merumuskan strategi perbaikan.
8. **Program Peningkatan Tata Kelola Organisasi:** Program ini bertujuan meningkatkan tata kelola organisasi agar lebih efektif dan akuntabel. Indikator tindak lanjut hasil pemeriksaan berhasil mencapai target 100%. Namun, beberapa indikator lain belum optimal akibat kendala teknis dan sistemik. Nilai SAKIP belum mencapai target dengan realisasi 50,7 dari target 66, sedangkan nilai maturitas SPIP mencapai 2,14 dari target 2,5. Indeks profesionalitas ASN berhasil mencapai target dengan nilai 65.

b. Analisis Komprehensif Per Aspek

Aspek Keuangan & Tata Kelola

Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Status
Opini Laporan Keuangan	-	-	WTP (100%)	Ekselen
Nilai Kinerja Anggaran	-	-	91% (110%)	Baik
Maturitas SPIP	2,93 (147%)	2,14	2,98 (119%)	Fluktuatif
Implementasi SPBE	-	-	80% (160%)	Sangat Baik
Indeks Pelayanan Publik	-	-	91,4% (305%)	Luar Biasa

Berdasarkan capaian indikator kinerja tata kelola, pada tahun 2025 UIN Imam Bonjol Padang menunjukkan kinerja yang sangat positif. Opini Laporan Keuangan berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan capaian 100% dan status ekselen. Nilai Kinerja Anggaran mencapai 91% atau setara 110% dari target, yang menunjukkan pengelolaan anggaran berjalan baik dan efektif. Meskipun

Maturitas SPIP mengalami fluktuasi dari tahun 2023 ke 2024, capaian tahun 2025 kembali meningkat menjadi 2,98 atau 119% dari target. Selain itu, Implementasi SPBE mencapai 80% dan Indeks Pelayanan Publik mencapai 91,4%, yang masing-masing memperoleh status sangat baik dan luar biasa, mencerminkan penguatan tata kelola berbasis digital dan peningkatan kualitas layanan publik secara signifikan.

Aspek Akademik & Mutu Pendidikan

Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Status
Akreditasi A/Unggul	10,87% (38%)	23,91%	21% (105%)	Peningkatan signifikan
IPK Lulusan (S1-S3)	96%-101%	101%-104%*	-	Stabil di atas standar
Moderasi Beragama	90 (120%)	92	-	Konsisten baik
Literasi Keagamaan	-	-	73% (91,25%)	Baik, belum optimal

Pada aspek akademik dan mutu pendidikan, UIN Imam Bonjol Padang menunjukkan tren peningkatan dan stabilitas kinerja yang positif. Persentase program studi berakreditasi A/Unggul meningkat signifikan dari 10,87% pada tahun 2020 menjadi 23,91% pada tahun 2021, dan tetap terjaga pada tahun 2022 dengan capaian 21% atau 105% dari target. Rerata IPK lulusan jenjang S1 hingga S3 selama periode 2020–2021 berada pada kisaran 96%–104% dari standar, menunjukkan kualitas lulusan yang stabil dan konsisten di atas ketentuan. Indikator moderasi beragama juga menunjukkan kinerja konsisten dengan capaian nilai 90 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 92 pada tahun 2021. Sementara itu, literasi keagamaan pada tahun 2022 mencapai 73% atau 91,25% dari target, yang menandakan kinerja baik namun masih memerlukan upaya penguatan lebih lanjut.

Aspek Daya Saing & Link-Match

Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Status
Kerjasama Industri	10% (167%)	100%	17% (21%)*	Implementasi rendah
Penempatan Kerja	5 tahun (100%)	5 tahun (100%)	4,65% (5,82%)	Krisis serius
Sertifikasi Kompetensi	-	-	0,03% (0,03%)	Kegagalan total

Pada aspek daya saing dan *link and match*, kinerja UIN Imam Bonjol Padang menunjukkan tantangan serius yang perlu segera ditangani. Indikator kerja sama dengan industri mengalami fluktuasi, di mana capaian tinggi pada tahun 2020 dan 2021 belum berlanjut secara konsisten pada tahun 2022 sehingga implementasinya dinilai rendah. Indikator penempatan kerja lulusan berada pada kondisi kritis karena capaian tahun 2022 sangat jauh dari target yang ditetapkan, meskipun pada tahun-tahun sebelumnya masih berada pada batas standar. Kondisi ini mengindikasikan melemahnya keterhubungan antara lulusan dan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, sertifikasi kompetensi menunjukkan capaian yang sangat rendah pada tahun 2022, yakni hanya 0,03% dari target. Secara keseluruhan, aspek daya saing dan *link and match* berada dalam kondisi krisis dan membutuhkan intervensi strategis yang terarah dan berkelanjutan.

Aspek Internasionalisasi

Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Status
Reputasi Internasional	0% (0%)	0%	-	Gagal total
Mahasiswa Asing	53,85% (26925%)	115,38%	-	Keberhasilan luar biasa
Kontribusi SDGs	-	-	2% (100%)	Tercapai

Pada aspek internasionalisasi dan kontribusi global, kinerja UIN Imam Bonjol Padang menunjukkan capaian yang kontras antarindikator. Reputasi internasional

belum menunjukkan perkembangan karena hingga tahun 2021 capaian masih berada pada angka 0%, sehingga indikator ini dinilai gagal total. Sebaliknya, jumlah mahasiswa asing mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dengan capaian 53,85% pada tahun 2020 dan melonjak menjadi 115,38% pada tahun 2021, yang mencerminkan keberhasilan luar biasa dalam menarik minat mahasiswa internasional. Peningkatan ini menunjukkan potensi besar internasionalisasi institusi meskipun belum terkonversi menjadi reputasi akademik global. Sementara itu, kontribusi terhadap pencapaian SDGs pada tahun 2022 mencapai 2% atau 100% dari target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, aspek ini memperlihatkan keberhasilan pada mobilitas mahasiswa dan komitmen global, namun masih memerlukan penguatan strategi reputasi internasional.

5. Peta Masalah & Pencapaian

Ringkasan Evaluasi Kinerja Strategis

Kategori	Area	Indikator	Capaian / Status	Keterangan
Area Keberhasilan Tinggi	Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	305%	Kinerja luar biasa
	Internasionalisasi	Mahasiswa Asing	26925% (2020)	Daya tarik internasional sangat kuat
	Digitalisasi	Implementasi SPBE	160%	Transformasi digital berhasil
	Tata Kelola	Akuntabilitas Keuangan	WTP	Pengelolaan keuangan sangat baik
	Riset & Publikasi	Publikasi Ilmiah	102%	Peningkatan konsisten
Area Perbaikan Segera	Daya Saing Lulusan	Penempatan Kerja	5,82%	Krisis serius
	Kompetensi Lulusan	Sertifikasi Kompetensi	0,03%	Sistem gagal total
	Kemitraan	Implementasi Kerjasama	21%	MoU tidak berlanjut
	Reputasi Global	Reputasi Internasional	0%	Belum ada kemajuan

	Tata Kelola Data	Satu Data Indonesia	0%	Sistem terintegrasi belum tersedia
Area Tren Positif	Mutu Akademik	Akreditasi Unggul	38% → 105%	Peningkatan signifikan
	SDM	Kualifikasi Dosen	Tren meningkat	Konsisten dari tahun ke tahun
	Mutu Internal	Sistem Penjaminan Mutu	100%	Konsisten terlaksana
	Akuntabilitas	Nilai SAKIP	Pulih ke 136% (2022)	Pemulihan kinerja kuat

Ringkasan evaluasi kinerja strategis menunjukkan bahwa UIN Imam Bonjol Padang memiliki sejumlah capaian yang sangat menonjol sekaligus menghadapi tantangan serius pada beberapa area kunci. Area keberhasilan tinggi terlihat pada pelayanan publik dengan capaian indeks 305%, yang mencerminkan kualitas layanan yang luar biasa, serta peningkatan signifikan jumlah mahasiswa asing yang menunjukkan daya tarik internasional institusi. Transformasi digital melalui implementasi SPBE dan pengelolaan keuangan dengan opini WTP juga menegaskan tata kelola organisasi yang kuat dan akuntabel, didukung oleh peningkatan konsisten pada publikasi ilmiah. Di sisi lain, area perbaikan segera tampak pada daya saing lulusan, khususnya penempatan kerja dan sertifikasi kompetensi yang berada pada kondisi krisis, serta lemahnya tindak lanjut kerja sama dan belum berkembangnya reputasi internasional dan sistem data terintegrasi. Meskipun demikian, terdapat tren positif yang menjanjikan, seperti peningkatan signifikan akreditasi unggul, konsistensi pelaksanaan sistem penjaminan mutu, peningkatan kualifikasi dosen, serta pemulihan nilai SAKIP, yang menjadi modal strategis untuk mendorong perbaikan berkelanjutan ke depan.

6. Rekomendasi Prioritas 2023-2025

Tabel Prioritas Strategis dan Rencana Aksi

Prioritas	Isu Strategis	Target	Aksi Utama
Prioritas 1	Krisis Daya Saing Lulusan	Meningkatkan penyerapan lulusan dari 4,65% menjadi minimal 40%	Revolusi kurikulum berbasis kebutuhan industri, penerapan magang wajib, dan

			pelaksanaan sertifikasi kompetensi secara massal
Prioritas 2	Reputasi Internasional	Minimal 1 PTK masuk pemeringkatan internasional	Fokus pada penelitian kolaboratif internasional dan peningkatan publikasi pada jurnal bereputasi global
Prioritas 3	Sistem Data Terpadu	Implementasi penuh Satu Data Indonesia	Integrasi seluruh sistem data institusi dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan
Prioritas 4	Optimalisasi Kerja Sama	Meningkatkan implementasi kerja sama dari 21% menjadi 60%	Monitoring dan evaluasi berkala serta pemberian insentif bagi kerja sama yang produktif dan berdampak

B. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Tabel Realisasi Anggaran berdasar Output Kegiatan

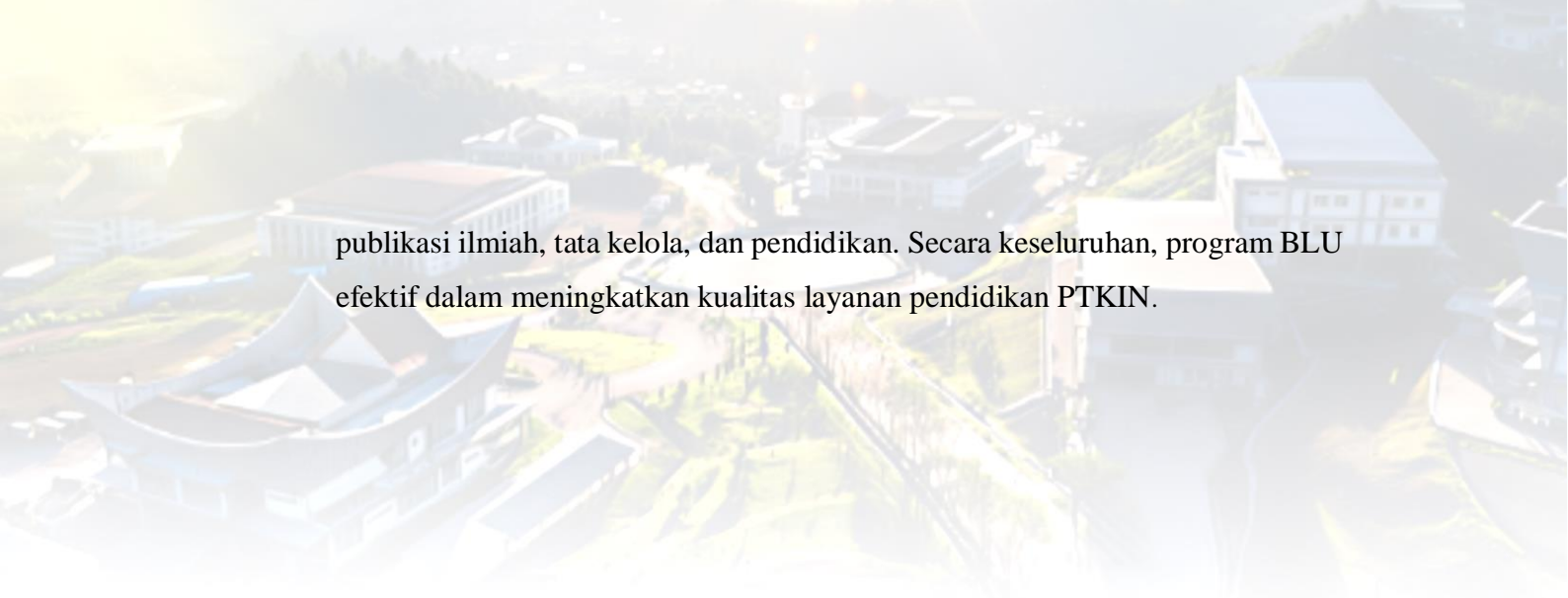
Nama program	Nama Kegiatan	Klarifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Komponen	Anggaran		Persentase	output	
					Pagu	Total Realisasi		Target	Total Realisasi
					(Rp.)	(Rp.)		(Volume)	(Volume)
DK	2132	BEI	BEI001	052					
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi	Bantuan Lembaga	Bantuan Operasional Kopertais	Oprasional Penyelenggaraan Kopertais	285.940.000	278.980.210	97.57 %	1	1
DK	2132		BEI003	004					
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi		BOPTN	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	12.055.539.000	9.742.882.506	80.82 %	1	1
DK	2132		BEI004	051					
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi			Seleksi Nasional Mahasiswa Baru SPAN/UMPTKIN	494.000.000	393.666.306	79.69 %	1	1
DK	2132	BEJ	BEJ.001	004					
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi	Bantuan Pendidikan Tinggi	Dosen Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	8.841.418.000	8.841.267.600	100 %	220	220
DK	2132	BEJ	BEJ.008	004					
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi	Bantuan Pendidik	Dosen Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	226.800.000	90.775.000	40.02 %	27	17

Nama program	Nama Kegiatan	Klarifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Komponen	Anggaran		output		
					Pagu	Total Realisasi	Persentase	Target	Total Realisasi
					(Rp.)	(Rp.)	%	(Volume)	(Volume)
DK	2132	BGC	BGC.001	061					
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	PTKIN yang meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui BLU	Mahasiswa Penerima Penghargaan (BLU)	1.071.641.000	730.438.000	68.16 %	1	1
DK	2132			062					
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi			Operasional Perkantoran Bersumber (BLU)	28.214.463.000	24.571.034.842	87.09 %	1	1
DK	2132			063					
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi			Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan (BLU)	4.583.245.000	3.227.491.465	70.42 %	1	1
DK	2132			064					
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi			Penerbitan/ Publikasi Ilmiah (BLU)	2.371.264.000	2.033.413.426	85.75 %	1	1
DK	2132			065					
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi			Sistem Tata Kelola, Kelembagaan dan SDM (BLU)	14.296.902.000	11.296.421.098	79.01 %	1	1
DK	2132			066					
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi			Yudisium/ Wisuda (BLU)	2.761.860.000	1.862.328.500	67.43 %	1	1

Nama program	Nama Kegiatan	Klarifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Komponen	Anggaran			output	
					Pagu	Total Realisasi	Persentase	TARGET	Total Realisasi
					(Rp.)	(Rp.)	%	(Volume)	(Volume)
DK	2132			067					
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi			Penyelenggara Pendidikan dan Pengajaran (BLU)	12.613.693.000	9.996.917.187	79.25 %	1	1
DK	2132	CAA	CAA.001	053					
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi	Sarana Bidang Pendidikan	Sarana PTKI	Revitalisasi Peralatan Lab. Sainstek	400.000.000	380.270.013	95.07 %	1	1
DK	2132		CAA.002	051					
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi		Sarana PTKIN PNB/BLU	Peralatan Penunjang Pendidikan (PNBP/BLU)	6.146.185.000	5.260.798.375	85.59 %	1	1
DK	2132	CAN	CAN.001	051					
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengadaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengadaan Sarana Bidang TIK	600.000.000	576.000.000	96.00 %	1	1
DK	2132			053					
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi			Pengadaan Sarana Bidang TIK	1.455.987.000	1.158.033.021	79.54 %	1	1
DK	2132	CBJ	CBJ.005	051					
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Prasarana PTKIN (PNBP/BLU)	Prasarana Pendidikan pada PTKIN (PNBP/BLU)	64.303.758.000	59.232.297.104	92.11 %	1	1

Nama program	Nama Kegiatan	Klarifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Komponen	Anggaran			output	
					Pagu	Total Realisasi	Persentase	Target	Total Realisasi
					(Rp.)	(Rp.)	%	(Volume)	(Volume)
DK	2132	QEJ	QEJ.006	051					
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi	Bantuan Pendidikan Tinggi	Mahasiswa Penerima Bidik Misi	Bidik Misi On Going Thn 2019	1.221.000.000	1.221.000.000	100%	185	185
DK	2132		QEJ.007	051					
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi		Mahasiswa PTKI Penerima KIP Kuliah	KIP Kuliah On Going (Tahun 2020,2021,2022)	9.596.400.000	9.596.400.000	100%	1.177	1.177
DK	2132			052					
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi			KIP Kuliah (Rekrutmen Baru)	2.970.000.000	2.970.000.000	100%		
WA	2135	EBA	EBA.994	001					
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	79.646.386.000	79.414.505.031	99.71%	1	1
WA	2135			002					
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	7.030.000.000	5.865.622.525	83.44%	1	1
WA	2135	EBD	EBD.953	051					
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	50.000.000	17.860.000	35.72%	1	1

- a. 2132.BEI.001 Bantuan Operasional Kopertais: Bantuan Operasional Kopertais dialokasikan sebesar Rp285.940.000 dengan realisasi Rp278.980.210 atau 97,57% dari pagu. Seluruh output program berhasil direalisasikan dengan capaian 100%. Tingkat serapan anggaran yang tinggi menunjukkan efisiensi pelaksanaan program. Dengan demikian, tujuan program tercapai secara optimal.
- b. 2132.BEI.003 BOPTN Dana BOPTN dialokasikan sebesar Rp12.055.539.000 dengan realisasi Rp9.742.882.506 atau 80,82%. Seluruh layanan dan target program berhasil dicapai dengan tingkat capaian 100%. Hal ini menunjukkan efektivitas pemanfaatan anggaran meskipun masih terdapat sisa pagu. Program berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan.
- c. 2132.BEI.004 Seleksi Nasional Mahasiswa Baru: Pagu anggaran seleksi nasional mahasiswa baru sebesar Rp494.000.000 dengan realisasi Rp393.666.306 atau 79,69%. Seluruh layanan seleksi berhasil dilaksanakan dengan capaian output 100%. Program ini mendukung proses penerimaan mahasiswa secara efektif. Sisa anggaran tidak mengurangi ketercapaian tujuan program.
- d. 2132.BEJ.001 Tunjangan Profesi Dosen Non PNS: Anggaran tunjangan profesi dosen non PNS sebesar Rp8.841.418.000 terealisasi hampir penuh sebesar Rp8.841.267.600 atau 100%. Seluruh dana digunakan untuk membayar tunjangan kepada 220 dosen non PNS. Seluruh target program tercapai sesuai perencanaan. Program ini berjalan sangat efektif dan tepat sasaran.
- e. 2132.BEJ.008 Tunjangan Fungsional Dosen Non PNS: Pagu tunjangan fungsional dosen non PNS sebesar Rp226.800.000 dengan realisasi Rp90.775.000 atau 40,02%. Rendahnya serapan disebabkan sebagian dosen sasaran telah lulus P3K. Meskipun demikian, capaian output program tetap 100%. Program dinilai berhasil dengan penyesuaian kondisi sasaran.
- f. 2132.BGC.001 Peningkatan Kualitas Layanan PTKIN melalui BLU: Program BLU memiliki pagu Rp65.913.068.000 dengan realisasi Rp46.379.466.899 atau 70,36%. Seluruh tujuan program tercapai dengan capaian output 100%. Program ini mencakup tujuh komponen utama, termasuk operasional, kemahasiswaan,



publikasi ilmiah, tata kelola, dan pendidikan. Secara keseluruhan, program BLU efektif dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan PTKIN.

2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2024

Nama program	Nama Kegiatan	Klarifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Komponen	Anggaran		Persentase	output	
					Pagu	Total Realisasi		Target	Total Realisasi
					(Rp.)	(Rp.)		(Volume)	(Volume)
DK	2132		BEI.003	004					
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi		BOPTN	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	12.173.413.000	9.588.791.332	82,50 %	1	1
DK	2132	BEJ	BEJ.001	004					
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi	Bantuan Pendidikan Tinggi	Dosen Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	12.125.582.000	9.368.012.400	77,26 %	220	220
DK	2132	BGC	BGC.001	061					
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	PTKIN yang meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui BLU	Mahasiswa Penerima Penghargaan (BLU)	114.847.686.600	67.693.701.623	59,43 %	1	1

Nama program	Nama Kegiatan	Klarifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Komponen	Anggaran			output	
					Pagu	Total Realisasi	Persentase	Target	Total Realisasi
					(Rp.)	(Rp.)	%	(Volume)	(Volume)
DK	2132		CAA.002	051					
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi		Sarana PTKIN PNB/BLU	Peralatan Penunjang Pendidikan (PNBP/BLU)	23.875.162.000	19.512.869.360	81,73 %	1	1
DK	2132	CAN	CAN.001	051					
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengadaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengadaan Sarana Bidang TIK	10.057.576.000	8.911.820.000	88,61 %	1	1
DK	2132	CBJ	CBJ.005	051					
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Prasarana PTKIN (PNBP/BLU)	Prasarana Pendidikan pada PTKIN (PNBP/BLU)	46.377.740.000	42.834.752.696	92,36 %	1	1
DK	2132		QEJ.007	051					
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi		Mahasiswa PTKI Penerima KIP Kuliah	KIP Kuliah On Going (Tahun 2020,2021,2022)	16.678.200.000	16.678.200.000	100,00 %	1.627	1.627
WA	2135	EBA	EBA.994	001					

Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	104.178.487.000	103.010.050.996	98,88 %	2	2
WA	2135	EBD	EBD.953	051					
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	105.000.000	73.429.635	69,93 %	1	1
WA	2135	EBD	EBD.952	052					
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	50.000.000	44.372.900	88,75 %	1	1

Berikut adalah ringkasan kinerja keuangan dan capaian program berdasarkan laporan yang diberikan:

1. **BOPTN (2132.BEL.003):** Pagu Rp 12,17 M, realisasi Rp 9,59 M (serapan 82,50%). Capaian layanan 100%, lebih tinggi dari tahun lalu (80,82%).
2. **Tunjangan Profesi Dosen Non-PNS (2132.BEJ.001):** Pagu Rp 12,13 M, realisasi Rp 9,37 M (serapan 77,26%). Target tercapai untuk 220 dosen (100%).
3. **Peningkatan Layanan PTKIN via BLU (2132.BGC.001):** Pagu Rp 114,85 M, realisasi Rp 67,69 M (serapan 59,43%). Capaian program 100%, meski serapan turun dari tahun lalu (70,36%).
4. **Sarana PTKIN PNB/BLU (2132.CAA.002):** Pagu Rp 23,88 M, realisasi Rp 19,51 M (serapan 81,73%). Capaian output 100%, termasuk penambahan fasilitas Mah'ad Al Jami'ah.
5. **Pengadaan Sarana TIK (2132.CAN.001):** Pagu Rp 10,06 M, realisasi Rp 8,91 M (serapan 88,61%). Pengadaan termasuk drone dan peralatan pendukung data.

6. **Prasarana PTKIN PNBP/BLU (2132.CBJ.005):** Pagu Rp 46,38 M, realisasi Rp 42,83 M (serapan 92,36%). Kegiatan meliputi pembangunan prasarana seperti kantin.
7. **KIP Kuliah Mahasiswa PTKI (2132.QEJ.007):** Pagu Rp 16,68 M, realisasi 100% (Rp 16,68 M). Target 1.627 mahasiswa tercapai 100%, mendukung akses pendidikan.
8. **Layanan Perkantoran (2135.EBA.994):** Pagu Rp 104,18 M, realisasi Rp 103,01 M (serapan 98,88%). Mendukung kelancaran kegiatan rutin dan non-rutin universitas.
9. **Layanan Pemantauan & Evaluasi (2135.EBD.953):** Pagu Rp 105 juta, realisasi Rp 73,43 juta (serapan 69,93%). Bertujuan meningkatkan efektivitas program.
10. **Layanan Perencanaan & Penganggaran (2135.EBD.952):** Pagu Rp 50 juta, realisasi Rp 44,37 juta (serapan 88,75%). Mendukung perencanaan strategis organisasi.

3. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Tabel Kinerja Realisasi Anggaran dan Output Tahun 2025

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Klarifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Komponen	Kode (DK/WA)	Pagu (Rp.)	Total Realisasi (Rp.)	Persentase (%)	Target (Volume)	Total Realisasi (Volume)
1	Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi	Bantuan Lembaga	Bantuan Operasional Kopertais	Bantuan Operasional Kopertais	2132-BEI-001-052	134.189.000	18.065.306	13.46	1 Lembaga	1 Lembaga
2	Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi	Bantuan Lembaga	BOPTN	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	2132-BEI-003-004	9.029.386.000	8.450.629.672	93.59	1 Lembaga	1 Lembaga
3	Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi	Bantuan Pendidikan Tinggi	Dosen Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	2132-BEJ-001-004	12.712.542.000	11.260.895.600	87.82	317 orang	317 orang
4	Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi	Bantuan Pendidikan Tinggi	Dosen Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	2132-BEJ-008-004	110.100.000	29.125.000	26.45	11 orang	11 orang
5	Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	PTKIN yang meningkatkan kualitas layanan pendidikannya melalui BLU	-	2132-BGC-001	101.090.646.000	54.080.286.463	53.50	1 Lembaga	1 Lembaga
6	Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi	Sarana Bidang Pendidikan	Sarana PTKIN PNPB/BLU	Peralatan Penunjang Pendidikan (BLU)	2132-CAA-002-052	11.734.229.000	7.672.508.985	65.39	1 paket	1 paket
7	Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengadaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengadaan Sarana Bidang TIK	2132-CAN-001-053	2.064.222.000	225.023.525	10.90	1 unit	1 unit

8	Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Prasarana PTKIN (PNBP/BLU)	Prasarana Pendidikan pada PTKIN (BLU)	2132-CBJ-005-052	1.653.252.000	536.290.400	32.44	1 unit	1 unit
9	Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi	Bantuan Pendidikan Tinggi	Mahasiswa PTKI Penerima KIP Kuliah	Mahasiswa PTKI Penerima KIP Kuliah	2132-QEJ-007-004	18.315.000.000	18.315.000.000	100.00	1650 orang	1650 orang
10	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	2135-EBA-994-001	103.787.192.000	97.646.178.753	94.08	1 layanan	1 layanan
11	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2135-EBA-994-002	5.089.335.000	4.447.539.644	87.39	1 Tahun	1 Tahun

Berikut adalah narasi analisis mendetail untuk setiap program/kegiatan berdasarkan data realisasi anggaran dan output tahun 2025:

- a. **Bantuan Operasional Kopertais (Kode: 2132-BEI-001-052):** Program Bantuan Operasional Kopertais menunjukkan kinerja yang sangat rendah dalam penyerapan anggaran. Dari pagu sebesar Rp134.189.000, hanya Rp18.065.306 (13,46%) yang berhasil direalisasikan. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dengan kebutuhan aktual. Namun demikian, secara output, program ini berhasil mencapai targetnya secara penuh dengan realisasi 1 lembaga dari target 1 lembaga. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas perencanaan keuangan, di mana target layanan tercapai meski dengan utilisasi anggaran yang minimal. Perlu dilakukan evaluasi mendalam mengenai metode penyusunan anggaran untuk kegiatan ini agar lebih realistis di tahun mendatang.

- b. **BOPTN (Kode: 2132-BEI-003-004):** Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) mencatat kinerja yang sangat baik. Anggaran yang direalisasikan mencapai Rp8.450.629.672 atau 93,59% dari pagu sebesar Rp9.029.386.000. Tingkat penyerapan yang tinggi ini disertai dengan capaian output yang sempurna, di mana target layanan kepada 1 lembaga berhasil terpenuhi. Hasil ini merefleksikan program yang berjalan secara efektif dan efisien sebagai bagian dari dukungan operasional inti perguruan tinggi. Kinerja BOPTN dapat dijadikan acuan bagi program-program pendanaan lain dalam hal akurasi perencanaan dan ketepatan pelaksanaan.
- c. **Tunjangan Profesi Dosen Non-PNS (Kode: 2132-BEJ-001-004):** Program Tunjangan Profesi untuk Dosen Non-PNS menunjukkan hasil yang positif. Realisasi anggaran mencapai Rp11.260.895.600 atau 87,82% dari pagu sebesar Rp12.712.542.000. Dari sisi output, program ini berhasil mencapai target dengan sangat baik, di mana 317 orang dosen penerima berhasil direalisasikan dari target yang sama. Tingkat penyerapan yang mendekati 90% ini menunjukkan proses distribusi dana berjalan lancar, dengan hanya sedikit sisa anggaran yang mungkin disebabkan oleh faktor administratif atau perbedaan kecil dalam nominal tunjangan per individu. Program ini telah berhasil memenuhi tujuannya dalam memberikan dukungan finansial kepada tenaga pendidik.
- d. **Tunjangan Fungsional Dosen Non-PNS (Kode: 2132-BEJ-008-004):** Kinerja program Tunjangan Fungsional Dosen Non-PNS masih tergolong rendah. Realisasi anggaran hanya mencapai Rp29.125.000 atau 26,45% dari pagu Rp110.100.000. Fenomena menarik terjadi di sini: meski penyerapan anggaran sangat kecil, target output tercapai 100% dengan 11 orang dosen menerima tunjangan. Disparitas yang besar antara anggaran yang dialokasikan (pagu) dengan anggaran yang dibutuhkan secara riil (realisasi) mengindikasikan adanya **over-budgeting** atau penganggaran yang berlebihan. Perlu koreksi fundamental dalam metode penghitungan kebutuhan dan penetapan pagu per penerima agar alokasi dana menjadi lebih akurat dan efisien di masa depan.
- e. **Peningkatan Kualitas PTKIN melalui BLU (Kode: 2132-BGC-001):** Program strategis untuk meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) melalui Badan Layanan Umum (BLU)

menunjukkan performa yang **mengkhawatirkan**. Dengan pagu yang sangat besar, yaitu Rp101.090.646.000, realisasi hanya mencapai Rp54.080.286.463 atau 53,50%. Meskipun output dinyatakan tercapai (1 Lembaga), penyerapan yang kurang dari 60% untuk program bernilai ratusan miliar merupakan **red flag** serius. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, seperti kendala birokrasi dalam tata kelola BLU, proses pengadaan yang panjang, pembayaran bertahap (termin) yang belum tuntas, atau keterlambatan pelaksanaan kegiatan fisik. Program ini memerlukan **investigasi dan pemantauan khusus** untuk mengidentifikasi hambatan dan memastikan dana masyarakat digunakan secara optimal.

- f. **Sarana PTKIN PNB/BLU (Kode: 2132-CAA-002-052)**: Program pengadaan sarana untuk PTKIN yang bersumber dari PNB/BLU mencatat kinerja yang cukup. Realisasi anggaran sebesar Rp7.672.508.985 mencapai 65,39% dari pagu Rp11.734.229.000. Output program berupa 1 paket sarana pendidikan berhasil direalisasikan. Tingkat serapan sekitar dua pertiga ini dapat mengindikasikan beberapa hal: pekerjaan fisik mungkin telah selesai 100% namun pembayaran kepada penyedia barang/jasa masih berjalan (masih ada termin terakhir), atau terjadi efisiensi dalam proses pengadaan sehingga harga perolehan lebih rendah dari yang dianggarkan. Meski demikian, masih ada ruang untuk mempercepat dan memaksimalkan penyerapan anggaran di periode yang sama.
- g. **Pengadaan Sarana Bidang TIK (Kode: 2132-CAN-001-053)**: Program Pengadaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mencatat **kinerja yang sangat rendah dan bermasalah**. Dari pagu Rp2.064.222.000, realisasi hanya Rp225.023.525 atau **10,90%**. Persentase yang sangat minim ini merupakan **tanda bahaya** dalam pengelolaan proyek. Kemungkinan penyebabnya antara lain: **kegiatan pengadaan tertunda** akibat proses lelang yang rumit, **gagal lelang** sehingga harus diulang, atau **perubahan mendasar pada spesifikasi teknis** barang yang diadakan sehingga membutuhkan waktu revisi yang panjang. Pencapaian output "1 unit" dengan nilai realisasi yang sangat rendah memunculkan keraguan tentang kesesuaian kuantitas atau kualitas barang yang akhirnya diterima. Program ini memerlukan **tindakan korektif segera**.

- h. **Prasarana PTKIN PNB/BLU (Kode: 2132-CBJ-005-052):** Seperti halnya sarana TIK, program pembangunan dan perbaikan prasarana PTKIN juga mengalami kendala serius. Realisasi anggaran hanya Rp536.290.400 atau 32,44% dari pagu Rp1.653.252.000. Rendahnya penyerapan ini sangat khas untuk proyek konstruksi atau pembangunan fisik, yang seringkali terhambat oleh faktor-faktor seperti: **perolehan izin yang lambat, kondisi cuaca** yang tidak mendukung, **kinerja penyedia jasa** yang tidak optimal, atau **perubahan desain** di tengah jalan. Meski output 1 unit tercapai, kemungkinan besar pekerjaan fisik belum sepenuhnya selesai sesuai kontrak. Perlu pengawasan ketat terhadap timeline dan kualitas pelaksanaan pekerjaan.
- i. **KIP Kuliah untuk Mahasiswa PTKI (Kode: 2132-QEJ-007-004):** Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) menunjukkan **kinerja yang sempurna dan patut diacungi jempol**. Baik dari sisi keuangan maupun output, program ini mencapai 100%. Seluruh pagu sebesar Rp18.315.000.000 terserap sempurna dan berhasil disalurkan kepada 1.650 mahasiswa penerima, tepat sesuai target. Pencapaian ini membuktikan bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial langsung kepada mahasiswa telah **matang, tepat sasaran, dan tepat waktu**. Program KIP Kuliah merupakan contoh terbaik dari efisiensi birokrasi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara untuk pemerataan pendidikan.
- j. **Gaji dan Tunjangan (Kode: 2135-EBA-994-001):** Komponen belanja untuk Gaji dan Tunjangan Pegawai mencatat kinerja yang sangat baik. Dari pagu sebesar Rp103.787.192.000, realisasi mencapai Rp97.646.178.753 atau 94,08%. Tingkat penyerapan yang tinggi ini wajar dan expected, karena gaji dan tunjangan merupakan kewajiban tetap yang harus dibayarkan setiap bulan. Sisa anggaran sekitar 6% kemungkinan berasal dari komponen tunjangan kinerja yang pembayarannya bersifat variabel dan tergantung pada hasil evaluasi pencapaian target pegawai. Secara keseluruhan, pengelolaan belanja personalia berjalan dengan lancar dan terkendali.
- k. **Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Kode: 2135-EBA-994-002):** Program operasional dan pemeliharaan kantor menunjukkan kinerja yang baik dengan realisasi anggaran mencapai Rp4.447.539.644 atau 87,39% dari pagu

Rp5.089.335.000. Pengelolaan belanja rutin untuk keperluan kantor seperti listrik, air, telekomunikasi, internet, dan pemeliharaan ringan bangunan serta peralatan tampak efisien. Persentase realisasi di bawah 100% yang masih dalam kategori baik ini dapat mengindikasikan adanya penghematan dalam pelaksanaan atau penundaan beberapa pekerjaan pemeliharaan non-kritis ke periode anggaran berikutnya, yang merupakan praktik pengelolaan keuangan yang sehat.

4. Analisis Penggunaan Anggaran Tahun 2023 – 2025

Analisis Kinerja Realisasi Anggaran dan Output Per Tahun

Kode & Nama Kegiatan	Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Serapan (%)	Target Output	Capaian Output	Keterangan & Analisis Tren
2132.BEI.001 Bantuan Operasional Kopertais	2023	285.940.000	278.980.210	97.57%	1 Lembaga	100%	Serapan tinggi dan capaian maksimal.
	2025	134.189.000	18.065.306	13.46%	1 Lembaga	100%	Penurunan drastis serapan. Anggaran dan realisasi menurun tajam, tetapi target output tetap tercapai.
2132.BEI.003 BOPTN	2023	12.055.539.000	9.742.882.506	80.82%	1 Layanan	100%	Capaian output maksimal.
	2024	12.173.413.000	9.588.791.332	82.50%	1 Layanan	100%	Tren stabil. Serapan sedikit meningkat, capaian tetap 100%.
	2025	9.029.386.000	8.450.629.672	93.59%	1 Lembaga	100%	Peningkatan efisiensi. Pagu turun, namun serapan meningkat signifikan mendekati 100%, capaian tetap maksimal.
2132.BEI.004 Seleksi Nasional Mahasiswa Baru	2023	494.000.000	393.666.306	79.69%	1 Layanan	100%	Capaian output maksimal.
2132.BEJ.001 Tunj. Profesi Dosen Non PNS	2023	8.841.418.000	8.841.267.600	100%	220 Orang	100%	Serapan dan capaian sempurna.
	2024	12.125.582.000	9.368.012.400	77.26%	220 Orang	100%	Pagu naik, serapan turun. Penambahan pagu besar, tetapi realisasi dan persentase serapan menurun. Capaian output tetap 100%.
	2025	12.712.542.000	11.260.895.600	87.82%	317 Orang	100%	Perbaikan serapan. Target penerima meningkat, serapan anggaran membaik dibanding

							2024, capaian tetap 100%.
2132.BEJ.008 Tunj. Fungsional Dosen Non PNS	2023	226.800.000	90.775.000	40.02%	27 Orang	100%*	Serapan rendah karena 10 dosen lulus P3K, tetapi capaian dihitung 100% untuk kondisi baru.
	2025	110.100.000	29.125.000	26.45%	11 Orang	100%	Penurunan lanjutan. Pagu dan realisasi menurun, target penerima menyesuaikan. Serapan tetap rendah, capaian dinyatakan 100%.
2132.BGC.001 PTKIN via BLU	2023	65.913.068.000	46.379.466.899	70.36%	1 Program	100%	Serapan cukup baik, capaian maksimal.
	2024	114.847.686.600	67.693.701.623	59.43%	1 Program	100%	Pagu melonjak, serapan turun. Kenaikan pagu sangat besar (>74%), namun realisasi dan persentase serapan justru turun.
	2025	101.090.646.000	54.080.286.463	53.50%	1 Lembaga	100%	Tren serapan menurun. Pagu sedikit turun dari 2024, tetapi persentase serapan terus turun. Capaian output tetap dinyatakan 100%.
2132.CAA.002 Sarana PTKIN PNB/BLU	2023	6.146.185.000	5.260.798.375	85.59%	1 Paket	100%	Serapan dan capaian baik.
	2024	23.875.162.000	19.512.869.360	81.73%	1 Paket	100%	Ekspansi besar. Pagu naik hampir 4x lipat. Serapan tetap baik di atas 80%, capaian 100%.
	2025	11.734.229.000	7.672.508.985	65.39%	1 Paket	100%	Koreksi dan penurunan serapan. Pagu dikurangi dari 2024, dan persentase serapan turun signifikan.
2132.CAN.001 Sarana Bidang TIK	2023	2.055.987.000	1.734.033.021	84.34%	1 Unit	100%	Serapan dan capaian baik.
	2024	10.057.576.000	8.911.820.000	88.61%	1 Unit	100%	Ekspansi signifikan. Pagu naik ~5x lipat dengan serapan yang lebih tinggi.
	2025	2.064.222.000	225.023.525	10.90%	1 Unit	100%	Penurunan ekstrem. Pagu kembali ke level 2023, tetapi serapan sangat rendah (10.9%).
2132.CBJ.005 Prasarana PTKIN PNB/BLU	2023	64.303.758.000	59.232.297.104	92.11%	1 Unit	100%	Serapan sangat baik.
	2024	46.377.740.000	42.834.752.696	92.36%	1 Unit	100%	Pagu turun, kinerja stabil. Pagu berkurang,

							namun tingkat serapan tetap sangat tinggi (>92%).
	2025	1.653.252.000	536.290.400	32.44%	1 Unit	100%	Penurunan drastis. Pagu turun sangat tajam (~97%) dan serapan juga rendah.
2132.QEJ.007 KIP Kuliah	2023	12.566.400.000	12.566.400.000	100%	1,177 Orang	100%	Kinerja sempurna.
	2024	16.678.200.000	16.678.200.000	100%	1,627 Orang	100%	Peningkatan layanan. Pagu dan target penerima naik, kinerja tetap sempurna.
	2025	18.315.000.000	18.315.000.000	100%	1,650 Orang	100%	Kinerja konsisten sempurna. Program andalan dengan realisasi dan capaian 100% selama 3 tahun.
2135.EBA.994 Layanan Perkantoran	2023	86.676.386.000	85.280.127.556	98.39%	1 Layanan	100%	Serapan sangat tinggi.
	2024	104.178.487.000	103.010.050.996	98.88%	1 Layanan	100%	Kinerja stabil excellent. Pagu naik, serapan tetap sangat tinggi mendekati 100%.
	2025	108.876.527.000	102.093.718.397	93.77%	1 Layanan	100%	Sedikit penurunan serapan. Pagu naik, tetapi persentase serapan turun di bawah 95%, meski masih baik.
2135.EBD.953 Pemantauan & Evaluasi	2023	50.000.000	17.860.000	35.72%	1 Layanan	-	Serapan rendah karena banyak kegiatan tidak terlaksana.
	2024	105.000.000	73.429.635	69.93%	1 Layanan	-	Perbaikan signifikan. Pagu dan realisasi naik, serapan meningkat hampir dua kali lipat.
2135.EBD.952 Perencanaan & Penganggaran	2024	50.000.000	44.372.900	88.75%	1 Layanan	-	Serapan anggaran cukup baik.

Kesimpulan Analisis Tren:

- Kinerja Konsisten Excellent:** Program **KIP Kuliah (QEJ.007)** dan **Layanan Perkantoran (EBA.994)** menunjukkan kinerja terbaik dengan realisasi anggaran mendekati atau tepat 100% dan capaian output maksimal secara konsisten.
- Volatilitas Tinggi:** Beberapa program seperti **Bantuan Kopertais (BEI.001)**, **Sarana TIK (CAN.001)**, dan **Prasarana PTKIN (CBJ.005)** menunjukkan fluktuasi pagu dan realisasi yang sangat ekstrem antar

tahun, terutama dari 2024 ke 2025. Hal ini memerlukan evaluasi perencanaan dan eksekusi.

3. **Tren Penurunan Serapan:** Program PTKIN via BLU (BGC.001) menunjukkan pola peningkatan pagu yang drastis di 2024 diikuti penurunan serapan anggaran yang konsisten dari 2023 ke 2025, meski capaian output selalu dinyatakan 100%. Ini perlu dicek konsistensi pengukuran outputnya.
4. **Program dengan Perbaikan: Layanan Pemantauan & Evaluasi (EBD.953)** menunjukkan perbaikan kinerja dari serapan rendah (35.72%) menjadi cukup baik (69.93%) dari 2023 ke 2024.
5. **Penyesuaian Target:** Program Tunjangan Fungsional Dosen (BEJ.008) menunjukkan penyesuaian realistis antara pagu, target penerima, dan realisasi, meski persentase serapannya rendah.

C. Nilai Kinerja Anggaran (Nilai SMART dan Nilai IKPA)

Penilaian kinerja keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan tata kelola pelaksanaan anggaran pada Instansi Pemerintah. Seiring dengan meningkatnya alokasi APBN dari tahun ke tahun, dibutuhkan mekanisme yang mampu menunjukkan kredibilitas, akuntabilitas, serta keberlanjutan (*sustainability*) dalam pengelolaan anggaran dan belanja negara. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan kegiatan monitoring dan evaluasi (*monev*) pelaksanaan anggaran sebagai instrumen untuk menetapkan target, melaksanakan rencana, serta mengukur tingkat pencapaian terhadap target tersebut.

Pelaksanaan *monev* anggaran merupakan bagian dari fungsi manajemen keuangan negara yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBN dilakukan sesuai dengan prinsip disiplin fiskal, pengalokasian sumber daya yang selaras dengan prioritas nasional, serta penerapan prinsip kehati-hatian (*prudence*) guna menjaga akuntabilitas. Dalam rangka mengukur kinerja pelaksanaan anggaran secara komprehensif, Kementerian Keuangan menggunakan dua sistem utama, yaitu Sistem Monitoring Kinerja Terpadu (SMART) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Kedua instrumen tersebut digunakan untuk menilai efektivitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan, serta kualitas pertanggungjawaban anggaran pada setiap satuan kerja.

1) **Sistem Monitoring Kinerja Terpadu (SMART)**

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang tercantum dalam Sistem monitoring Kinerja Terpadu (SMART) ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan untuk melaksanakan 2 fungsi anggaran yaitu fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas.

Fungsi akuntabilitas (*proving*) bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas (*improving*) bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, mengidentifikasi pendukung dan kendala atas pelaksanaan anggaran dan sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan. Secara garis besar, Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 dibagi dalam beberapa tingkatan antara lain tingkat Kementerian Negara/Lembaga, tingkat unit Eselon I, dan tingkat Satuan Kerja (satker). Selain itu, perhitungannya terbagi atas Aspek Manfaat, Aspek Implementasi, dan Aspek Konteks.

Nilai Kinerja Anggaran pada satuan kerja (satker) yang hasil perhitungannya tercantum pada dashboard masing-masing satker dalam aplikasi SMART/E-

MONEV merupakan perhitungan atas aspek implementasi pada tingkat satker dengan rincian variabel dan bobot masing-masing variabel sebagai berikut:

Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektifitas	Efisiensi	
			Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
424050	UIN Imam Bonjol Padang	87.99	100.00	100.00	19.90

Penilaian Kinerja Anggaran UIN Imam Bonjol Padang dilakukan melalui pengukuran terhadap tiga aspek utama, yaitu perencanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, serta efisiensi penggunaan anggaran. Berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan, UIN Imam Bonjol Padang memperoleh capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dengan rincian sebagai berikut.

a) Kinerja Perencanaan Anggaran

UIN Imam Bonjol Padang memperoleh Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 87,99. Nilai ini menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Penyusunan dokumen perencanaan, termasuk TOR/RAB, penjadwalan kegiatan, serta penjabaran kebutuhan belanja telah dilakukan secara memadai. Namun demikian, nilai tersebut juga menggambarkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan, khususnya terkait peningkatan akurasi perencanaan kebutuhan dan keselarasan antara rencana dan pelaksanaan anggaran. Penguatan koordinasi internal dan perbaikan kualitas penyusunan perencanaan diperlukan agar perencanaan pada tahun berikutnya menjadi lebih tepat dan efisien.

b) Efektivitas Pelaksanaan Anggaran

Capaian Realisasi Output (RO): 100,00. Aspek efektivitas kinerja anggaran menunjukkan hasil yang sangat baik, dibuktikan dengan capaian Realisasi Output (RO) sebesar 100,00. Nilai ini mencerminkan bahwa seluruh output kegiatan yang direncanakan dalam DIPA dapat direalisasikan secara penuh sesuai target. Capaian tersebut menunjukkan kesesuaian antara

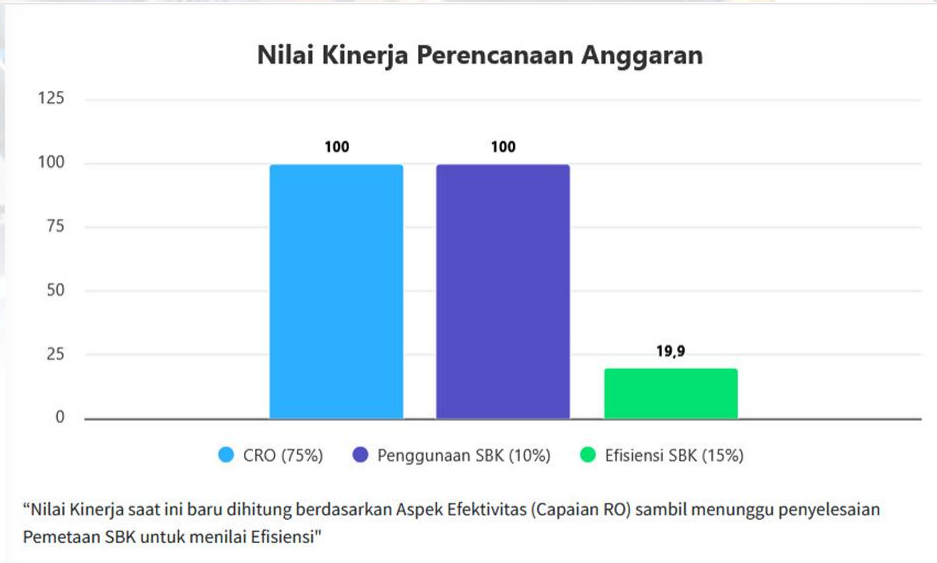
perencanaan program dengan pelaksanaan di lapangan, serta efektivitas pengelolaan kegiatan oleh satuan kerja.

c) Efisiensi Pelaksanaan Anggaran

1. Kepatuhan Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK): 100,00. Satuan kerja berhasil memperoleh nilai maksimal pada indikator penggunaan SBK, yaitu 100,00. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah sepenuhnya mematuhi ketentuan standar biaya yang berlaku. Seluruh komponen biaya yang digunakan sesuai dengan pedoman SBK dan telah dikelola secara tertib serta akuntabel.
2. Efisiensi SBK: 19,90. Pada aspek efisiensi biaya keluaran, satuan kerja memperoleh nilai 19,90, yang mengindikasikan perlunya peningkatan dalam optimalisasi penggunaan anggaran. Meskipun kepatuhan terhadap SBK sangat baik, nilai efisiensi menunjukkan bahwa masih terdapat potensi penghematan melalui strategi seperti konsolidasi kegiatan, penguatan perencanaan, serta peningkatan kualitas proses pengadaan.

Secara keseluruhan, capaian Nilai Kinerja Anggaran UIN Imam Bonjol Padang berada pada kategori baik hingga sangat baik.





2) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan *tools* yang menggunakan konsep Penganggaran Berbasis Kinerja/*Performance Based Budgeting*. Penganggaran Berbasis Kinerja adalah sebuah pendekatan dalam sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran yang dialokasikan dengan prestasi kerja atau kinerja yang diharapkan berupa keluaran (output) dan hasil (outcome), termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut sesuai dengan tugas pokok Kementerian Negara/Lembaga.



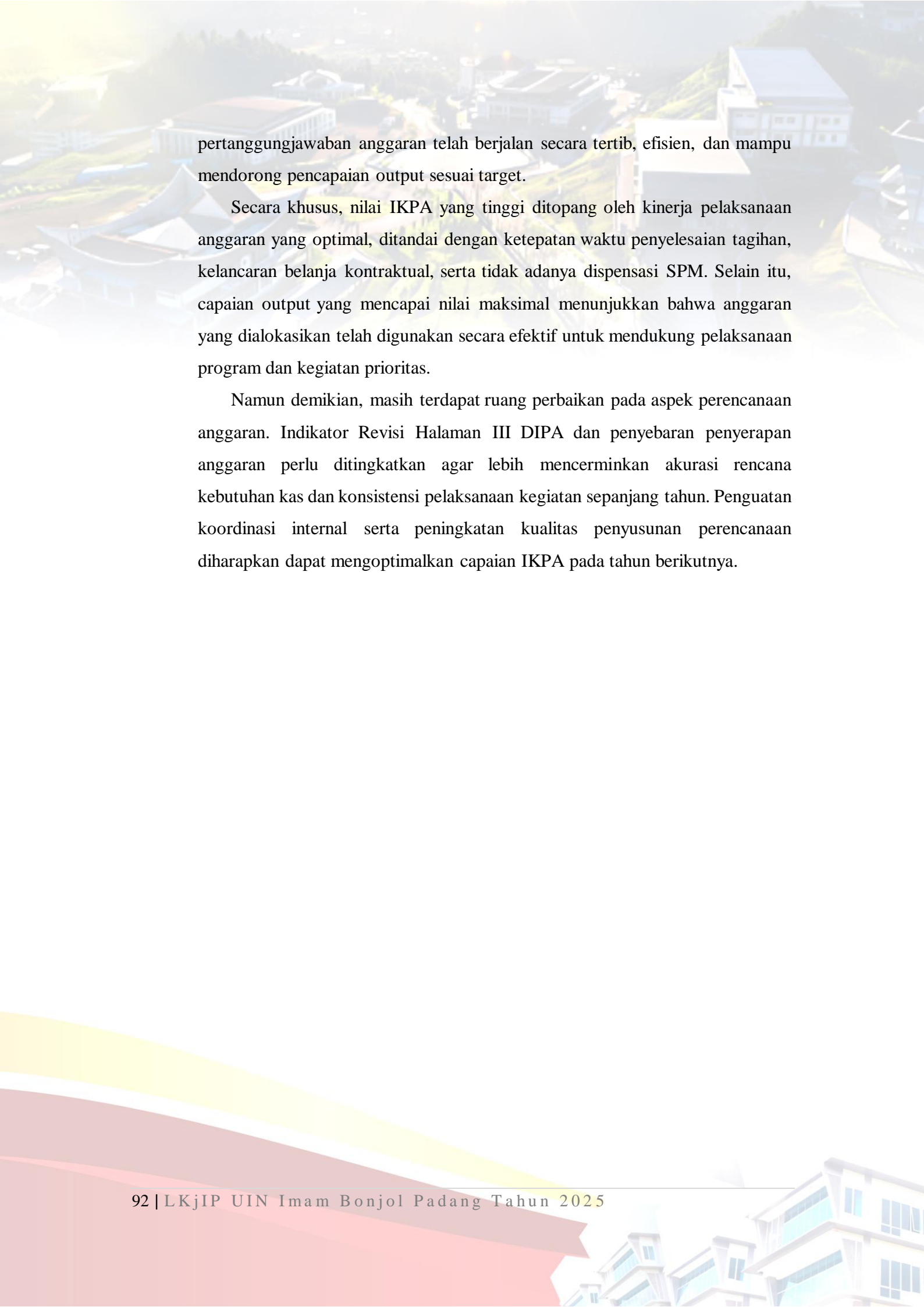
Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) memiliki 4 aspek dan 13 indikator untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran, yaitu:

No.	Aspek/Indikator	Bobot
1.	Aspek Kesesuaian Antara Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran	
	a. Revisi DIPA;	5%
	b. Deviasi Halaman III;	5%
	c. Pagu Minus.	5%
2.	Aspek Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran	
	d. Data Kontrak;	10%
	e. Pengelolaan UP dan TUP;	8%
	f. LPJ Bendahara;	5%
	g. Dispensasi SPM.	5%
3.	Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran	
	h. Penyerapan Anggaran;	15%
	i. Penyelesaian Tagihan;	10%
	j. Capaian Output;	17%
	k. Retur SP2D.	5%
4.	Aspek Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	
	l. Kesalahan SPM;	5%
	m. Perencanaan Kas.	5%

Berdasarkan penjelasan diatas hasil penilaian IKPA untuk UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2025 sebesar 94,01.

kode satuan kerja	Satuan Kerja	Kualitas perencanaan anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Dispensasi SPM	Nilai Akhir
		Revisi DIPA	Revisi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output		
424050	UIN Imam Bonjol Padang	100.00	72.06	89.51	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	94.01
Nilai Aspek		86.03		100.00				100.00		

Nilai IKPA sebesar 94,01 mencerminkan bahwa UIN Imam Bonjol Padang telah melaksanakan anggaran secara sangat baik, dengan tingkat kepatuhan dan efektivitas yang tinggi terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara. Capaian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, serta



pertanggungjawaban anggaran telah berjalan secara tertib, efisien, dan mampu mendorong pencapaian output sesuai target.

Secara khusus, nilai IKPA yang tinggi ditopang oleh kinerja pelaksanaan anggaran yang optimal, ditandai dengan ketepatan waktu penyelesaian tagihan, kelancaran belanja kontraktual, serta tidak adanya dispensasi SPM. Selain itu, capaian output yang mencapai nilai maksimal menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas.

Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan pada aspek perencanaan anggaran. Indikator Revisi Halaman III DIPA dan penyebaran penyerapan anggaran perlu ditingkatkan agar lebih mencerminkan akurasi rencana kebutuhan kas dan konsistensi pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun. Penguatan koordinasi internal serta peningkatan kualitas penyusunan perencanaan diharapkan dapat mengoptimalkan capaian IKPA pada tahun berikutnya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja institusi yang mengacu pada perencanaan kinerja sebagaimana diuraikan dalam Bab I dan Bab II serta hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pada Bab III. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, UIN Imam Bonjol Padang menunjukkan capaian yang sangat baik pada beberapa sasaran strategis. Sasaran meningkatnya partisipasi peserta didik pada pendidikan tinggi berhasil melampaui target, dengan realisasi peningkatan jumlah mahasiswa sebesar 16,26% dari target 15%, capaian target ini meningkat dibanding tahun 2024, serta terpenuhinya target pemerataan akses bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sebesar 0,05%.

Pada sasaran meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu, capaian kelembagaan menunjukkan hasil yang sangat positif, ditandai dengan persentase program studi terakreditasi A/Unggul sebesar 21% dari target 20%, serta keterlaksanaan sistem penjaminan mutu dan standar manajemen kelembagaan yang mencapai 100%. Namun demikian, capaian pada aspek *outcome* masih memerlukan perhatian serius, khususnya pada indikator persentase lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga bereputasi yang baru mencapai 0,03% dari target 90%, serta tingkat literasi keagamaan mahasiswa yang mencapai 73% dari target 80%. Sasaran meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan menunjukkan capaian optimal pada indikator sertifikasi pendidik dosen yang mencapai 95% sesuai target. Akan tetapi, indikator sertifikasi peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan masih belum optimal dengan realisasi 45% dari target 75%.

Pada sasaran meningkatnya kualitas lulusan yang diterima di dunia kerja, capaian kinerja masih sangat rendah, dengan persentase lulusan yang bekerja atau berwirausaha sebesar 4,65% dari target 80%. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara proses pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja yang memerlukan perhatian dan perbaikan berkelanjutan. Sasaran meningkatnya kerja sama perguruan tinggi keagamaan juga belum mencapai target, dengan realisasi kerja sama yang ditindaklanjuti dalam Tri Dharma sebesar 17% dari target 80%.

Sebaliknya, sasaran meningkatnya produktivitas dan daya saing pendidikan tinggi menunjukkan kinerja yang baik, ditandai dengan capaian persentase artikel jurnal bereputasi nasional yang disitasi sebesar 81,23% dari target 80% serta terpenuhinya target kontribusi terhadap pencapaian SDGs sebesar 2%.

Pada sasaran meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel, sebagian besar indikator menunjukkan capaian yang sangat memuaskan dan melampaui target, antara lain opini laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), nilai SAKIP sebesar 90 dari target 66, tingkat maturitas SPIP sebesar 2,98 dari target 2,5, implementasi SPBE sebesar 80% dari target 50%, indeks pelayanan publik sebesar 91,4 dari target 30, indeks BerAKHLAK sebesar 88,09 dari target 61, serta nilai kinerja anggaran sebesar 91 dari target 83. Namun demikian, indikator tata kelola data masih belum tercapai, ditandai dengan tingkat maturitas statistik sektoral dan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia yang belum menunjukkan realisasi.

Secara keseluruhan, capaian kinerja UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2025 menunjukkan keberhasilan signifikan pada aspek tata kelola, partisipasi pendidikan, serta produktivitas penelitian, namun masih memerlukan penguatan pada aspek kualitas lulusan, sertifikasi kompetensi, kerja sama, dan tata kelola data. Saat ini Rencana Strategis UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2025 – 2029 masih berbentuk draft.

B. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025, beberapa saran yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja UIN Imam Bonjol Padang pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penguatan kebijakan dan program peningkatan kompetensi lulusan, khususnya melalui integrasi sertifikasi kompetensi ke dalam kurikulum dan penguatan peran unit layanan karier.
2. Memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan serapan lulusan di dunia kerja serta relevansi pendidikan.
3. Meningkatkan efektivitas tindak lanjut kerja sama yang telah disepakati agar memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

4. Mengembangkan sistem tata kelola data yang terintegrasi untuk mendukung implementasi Statistik Sektor dan kebijakan Satu Data Indonesia.
5. Melanjutkan dan memperkuat capaian positif pada aspek tata kelola, akuntabilitas, serta produktivitas penelitian melalui inovasi berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi informasi.
6. Memfasilitasi pelatihan untuk mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, guna peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang.

C. Penutup

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2025 disusun sebagai wujud komitmen institusi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja UIN Imam Bonjol Padang pada masa yang akan datang.



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martin Kustati
Jabatan : Rektor UIN Imam Bonjol Padang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suyitno
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Januari 2025

Pihak Kedua,



Suyitno

Pihak Pertama,



Martin Kustati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UIN IMAM BONJOL PADANG

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada Pendidikan Tinggi	Persentase peningkatan mahasiswa pada PTK	15
		Persentase peningkatan mahasiswa berkebutuhan khusus pada PTK	0,05
2	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu	Persentase Prodi yang mendapatkan akreditasi A/unggul	20
		Persentase lulusan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi	90
		Persentase PTK yang melaksanakan sistem penjaminan mutu	100
		Persentase PTK yang melaksanakan standar manajemen kelembagaan	100
		persentase mahasiswa PTK yang memiliki tingkat kemampuan literasi keagamaan minimal baik	80
3	Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas	Persentase dosen PTK yang memperoleh sertifikasi pendidik	95
		Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi	75
4	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja	Persentase lulusan PTK yang berhasil memiliki pekerjaan atau berwiraswasta	80
5	Meningkatnya Kerjasama PTK	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dalam tri darma	80
6	Meningkatnya produktivitas dan daya saing Pendidikan Tinggi	Persentase artikel jurnal bereputasi nasional yang disitasi	80
		Persentase PTK yang berkontribusi pada pencapaian SDGs	2
7	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	Predikat Opini Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	66
		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2.5
		Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	50
		Indeks Pelayanan Publik	30
		Indeks BerAkhlak	61
		Tingkat Manuritas Statistik Sektoral	2,6
		Tingkat implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI)	60
		Nilai Kinerja Anggaran	83

No	Program	Anggaran
1	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Rp. 156.709.377.000
2	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	Rp. 97.922.000.000
Jumlah Seluruh		Rp. 254.631.377.000

Jakarta, 22 Januari 2025

Direktur Jenderal Pendidikan Islam



Suyitno



Rektor/Ketua

Martin Kustati



UIN IMAM BONJOL
PADANG

RENCANA AKSI

UIN IMAM BONJOL PADANG
2025

UIN IMAM BONJOL
PADANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun kompilasi rencana aksi unit kerja di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Rencana Aksi ini dimaksudkan sebagai komitmen serta tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip ini merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola yang baik dan merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) UIN Imam Bonjol Padang 2025-2029, yang dibuat secara periodic. Di dalamnya berisikan informasi mengenai kinerja organisasi dalam mendorong pelaksanaan kegiatan secara baik dan benar.

Disamping itu, rencana aksi ini dimaksudkan sebagai alat acuan bagi unit kerja di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran di tahun 2025. Rencana Aksi ini mengacu pada program kerja kegiatan yang telah disusun, dan telah dibuktikan dengan penandatanganan capaian realisasi per triwulan. Salah satu upaya yang dilakukan agar realisasi anggaran tahun 2025 berjalan dengan baik, terarah dan dapat dikontrol adalah dokumen rencana aksi. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada kegiatan yang sedikit keluar dari jadwal dikarenakan beberapa alasan tertentu. Walaupun rencana aksi ini pada dasarnya disusun oleh unit kerja terkait. Hal ini tentu akan berdampak kepada rencana penarikan per bulan, solusinya adalah dengan melakukan revisi rencana penarikan dana per triwulan.

Kami telah berupaya membuat dokumen rencana aksi ini dengan sebaik-baiknya, namun demikian disadari atau tidak dalam penyajiannya tentu, masih didapatkan kekurangan, untuk itu mohon kritik dan saran untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

Padang, 15 Januari 2025

Rektor,



Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd

NIP. 197308182005012004



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : w69aTo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR, *iii*

DAFTAR ISI, *iv*

RENCANA AKSI UIN IMAM BONJOL PADANG, 2025, *1*



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : **w69aTo**

Dengan terbentuknya Rencana Aksi Anggaran Tahun 2025 maka di Sahkan DIPA berdasarkan rincian Biaya dibawah ini :

No	Program	Anggaran
1	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Rp. 156.709.377.000
2	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	Rp. 97.922.000.000
	Jumlah Seluruh	Rp. 254.631.377.000



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : w69aTo

Rencana Aksi UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2025

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi	Target Triwulan (%)			
					I	II	III	IV
1	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada Pendidikan Tinggi	Persentase peningkatan mahasiswa pada PTK	15	Penerimaan Mahasiswa Jalur Nasional dan Jalur Mandiri	7,5	6	2,5	0
		Persentase peningkatan mahasiswa berkebutuhan khusus pada PTK	0,05	Penerimaan Mahasiswa Jalur Nasional dan Jalur Mandiri	0,025	0,02	0,005	0
2	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu	Jumlah Prodi yang mendapatkan akreditasi A/unggul	20	Revisi dokumen akreditasi dan AL	11	9	0	0
		Persentase lulusan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi	90	Mengikuti pelatihan sertifikasi sesuai bakat dan minat peserta didik	22,5	22,5	22,5	22,5
		Persentase PTK yang melaksanakan sistem penjaminan mutu	100	Memastikan pelaksanaan penjaminan mutu	25	25	25	25
		Persentase PTK yang melaksanakan standar manajemen kelembagaan	100	Membuat SOP	25	25	25	25
		Persentase mahasiswa PTK yang memiliki tingkat kemampuan literasi keagamaan minimal baik	80	Melakukan Standarisasi Skill Literasi Keagamaan Per Mahasiswa	20	20	20	20
3	Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas	Persentase dosen PTK yang memperoleh sertifikasi pendidik	95	Menyelenggarakan pelatihan pendidik	0	47,5	47,5	0
		Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi	75	Melaksanakan pelatihan dan wrokshop, penelitian, dan auditor akreditasi internasional	18,75	18,75	18,75	18,75
4	Meningkatnya kualitas lulusan PTK	Persentase lulusan PTK yang berhasil memiliki pekerjaan atau berwiraswasta	80	Meningkatkan pelatihan softskill dan pelatihan UMKM bagi mahasiswa	20	20	20	20
5	Meningkatnya Kerjasama PTK	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dalam tri darma	80	Melanjutkan kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat	20	20	20	20
6	Meningkatnya produktivitas dan daya saing Pendidikan Tinggi	Persentase artikel jurnal bereputasi nasional yang disitasi	80	Mengharguskan Dosen dan mahasiswa saling mengutip	20	20	20	20
		Persentase PTK yang berkontribusi pada pencapaian SDGs	2	Melaksanakan Green Kampus dan Sustainability	0	1	0	1
7	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	Predikat Opini Laporan Keuangan	WTP	Pelaksanaan Pengawasan Laporan Keuangan				
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	66	Pelatihan SDM dan membuat tim	16,5	16,5	16,5	16,5
		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2,5	Melengkapi regulasi maturitas dan implementasi menuju regulitas	0,625	0,625	0,625	0,625
		Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	50	Perbaikan sistem dan mendata kekurangan pada sistem	12,5	12,5	12,5	12,5
		Indeks Pelayanan Publik	30	Penambahan anggota PPID, membuatkan regulasi mekanisme kerja	7,5	7,5	7,5	7,5
		Indeks BerAkhlaq	61	Peningkatan kesadaran ketaatan terhadap regulasi	15,25	15,25	15,25	15,25
		Tingkat Maturitas Statistik Sektor	2,6	Pelatihan SDM terkait data Statistik	0,65	0,65	0,65	0,65
		Tingkat implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI)	60	Pelaksanaan mengikuti Satu Data Indonesia terkait dosen, tendik dan Sarana dan Prasarana	15	15	15	15
		Nilai Kinerja Anggaran	83	Reviu realisasi anggaran triwulan dan Reporting realisasi anggaran	20,75	20,75	20,75	20,75



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : w69aTo